



## RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

- 
- Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : 26  
Jenis Rapat : Rapat Kerja/RDP  
Dengan : Menteri PANRB, Ketua Ombudsman RI, Ketua BKN  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 3 Februari 2015  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)  
Acara : 1. Pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015  
2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014  
Ketua Rapat : **H. Mustafa Kamal, S.S./Wakil Ketua Komisi II DPR RI**  
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
- Hadir : **A. Anggota Komisi II DPR RI.**  
40 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

### PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

### F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
7. DIAH PITALOKA, S.sos
8. Ir. TAGORE ABUBAKAR
9. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
10. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM
11. Drs. SIRMADJI, M.Pd
- 12.

### F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

13. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
14. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
15. TABRANI MAAMUN
16. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

### F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

17. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
18. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si
19. H. SUBARNA, SE., M.Si
20. SUASANA DACHI, SH
21. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

**F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

AN MUSTOFA, M.Si.

ZULKIFLI ANWAR

24. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH

**F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

25. YANDRI SUSANTO

26. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.

27. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn

28. AMRAN, S.E.

**F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

29. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si

30. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

**F-PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

31. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.

32. Dr. H SA'DUDDIN, MM

33. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

**F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

34. H. MOH. ARWANI THOMAFI

35. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY

36. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

**F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

37. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH

38. Drs. TAMANURI, MM

39. H. M. LUTHFI A. MUTTY

**F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

40. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH

41. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

**B. Pemerintah**

- Menteri PANRB (Dr. Yuddy Chisnandi)

- Ketua Ombudsman RI (Danang Girindrawardana)

- Kepala Badan Kepegawaian Negara RI (Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.Sis.)

Jalannya Rapat:

**KETUA RAPAT (H. MUSTAFA KAMAL, S.S/F-PKS):**

Pak menteri mulai ya?

Ibu Ketua ORI;

Kepala BKN Saudara-saudara anggota Komisi II yang kami hormati Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

...agi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur  
...irnya kita bisa bertemu dengan Pak Menteri dengan Kepala  
...anakan tugas konstitusional di bidang anggaran pada hari ini  
mudah-mudahan kita semua dalam keadaan segar bugar sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan sekretariat sudah hadir dua puluh satu dan terus bertambah ini nampaknya mendekati kuorum dengan ada yang izin dan fraksi sudah 8 saya kira sambil berjalan saja kita buka rapat ini ya? setuju Pak?

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya kami akan mengusulkan jadwal rapat pada hari sederhana saja mudah-mudahan kita bisa bikin efisien karena padat sekali hari ini dengan agenda pembicaraan awal pembahasan APBNP 2015 dan evaluasi APBN tahun anggaran 2014 apakah kita bisa setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Rapat kita selesaikan jam 12.00 ya? yah saya kira kita bikin dengan penuh semangat atau pakai kaidahnya Pak Ketua kemarin sampai Zuhur katanya dan Zuhur itu bisa sampai jam 3 Sore, itu Zuhur juga jadi,

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Pimpinan,

**KETUA RAPAT:**

Ya, Bagaimana Pak Zul?

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Setuju sampai jam 12.00. Ini kan bicara hanya mengesahkan uangnya, iya atau tidak saja, jadi gampang itu.

**KETUA RAPAT:**

Kalau komitmen dari Pak Zul seperti itu kita bisa ketok palu ya? karena beliau yang menentukan panjang pendeknya ini rapat. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu sekalian mari kita dengarkan penyampaian APBNP 2015 serta terkait APBN 2014 kita gilir dengan terlebih dahulu Pak Menteri ya? kami persilakan Pak Menteri, ya ini ganti mic kita di protes juga Pak karena menambah belanja negara, apalagi bangun gedung baru. Mungkin sekalian saja pindah ibukota biar kita baru semuanya itu, mungkin tidak ada protes kalau itu.

Karena Pak menteri sudah biasa pindah-pindah tempat di sini beliau kelihatannya cari efisiensi saja ini.

**MENTERI PANRB (Dr. YUDDY CHISNANDI):**

***Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Pak Mustafa yang saya hormati;  
Pimpinan Komisi II Pak Rambe; dan  
Para anggota dewan dari Komisi II yang kami hormati.**

Insya Allah Subhanahu wata'ala kita bertemu lagi walaupun terasa sudah satu bulan kita berada di sini sebelumnya saya mohon maaf kemarin sudah mengagendakan hadir menemui para anggota dewan Komisi II yang terhormat namun mendadak diminta mendampingi Bapak Presiden untuk konsultasi dengan Pimpinan DPD dan DPR dan baru selesai menjelang maghrib sehingga tidak memungkinkan untuk hadir.

*Alhamdulillah* kita semua pada pagi hari ini sudah hadir di tempat ini dan 2 hal yang menjadi fokus pembicaraan kita pada pagi hari ini yaitu APBN P 2015 dan masalah Komisi II DPR RI. Untuk masalah K2, sebagaimana sudah disampaikan pada rapat kerja sebelumnya dan juga di dalam kesimpulan rapat kerja sebelumnya dengan Komisi II dicapai sebuah timetable penyelesaian K2 ini selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2015 sehingga untuk pentahapan-pentahapan penyelesaian roadmap teknisnya kami mengharapkan adanya pertemuan yang lebih teknis dan terbatas yang kelihatannya kalau kita bahas secara mendetil lewat forum yang besar seperti ini memerlukan waktu dan pembahasan yang harusnya lebih lebih intensif. Pada prinsipnya kami dari Kementrian PAN menerima berbagai saran, masukan, usulan, juga keputusan-keputusan bersama dengan Komisi II dan kami bertekad menyelesaikan masalah K2 ini dengan sebaik-baiknya, selekas-lekasnya dengan prinsip-prinsip *legal standing yuridis* dan juga rasa keadilan masyarakat.

Kami memiliki beberapa formulasi. Formulasi yang pertama tentu ada skala prioritas untuk jabatan fungsional khusus, misalnya yang bekerja di lingkungan pendidikan dan lingkungan kesehatan. Itu bisa menjadi skala prioritas. Kedua dilihat dari sisi pengabdian, masa kerja, dan prestasi, dan yang ketiga dari hasil verifikasi forensik administrasinya. Jadi mereka-mereka yang memang layak dan berhak saja yang mereka kemudian diikutkan kepada proses selanjutnya. Lalu kita juga memiliki formulasi dari sisi usia, karena kalau untuk CPNS itu ada batas usianya antara 18 sampai dengan 35 tahun sehingga yang akan diprioritaskan dalam program ini mungkin yang memang tidak masuk dalam kategori yang batas usianya sudah melampaui, dan formulasi-formulasi itu mudah-mudahan bisa di dibahas lebih detail lagi bersama Komisi II dan kami akan menerima berbagai masukan dari Komisi II dan juga tentu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

Prinsip kita akan selesaikan dengan sebaik baiknya dengan landasan hukum tentunya dan rasa keadilan, untuk itu kami meminta kepada yang terhormat anggota Komisi II untuk bisa menyetujui pembahasan yang bersifat detail dan teknis mengenai K2 ini bisa dilakukan pada kesempatan yang lain. Prinsipnya kesimpulan rapat kerja Komisi II yang lalu bahwa ini harus selesai di bulan Desember bisa kami penuhi.

Yang kedua tentang anggaran, perlu kami laporkan bahwa total anggaran APBNP 2015 yang kami ajukan itu Rp.195.925.924.000 atau kurang lebih 196 milyar. Dibandingkan dengan anggaran departemen-departemen instansi yang lain memang ini relatif kecil. Itu juga lebih kecil lagi karena sebenarnya 35 milyar itu adalah anggaran operasional Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi KASN masuk di sini. Jadi sebagai amanat undang-undang KASN ada di sini dan kami laporkan juga bahwa sementara ini seluruh kegiatan perkantoran KASN dilaksanakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di lantai 2 kami siapkan tempatnya. Jadi alokasi anggaran yang murni dari kementrian PAN sendiri Rp.160.925.924.000,- kurang lebih 161 milyar kurang. Dari anggaran yang tersebut kami fokuskan pada 3 area atau program yaitu program pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi 38,5 persen sebagaimana ada pada laporan yang kami sampaikan pada Bapak dan Ibu yang terhormat.

Lalu management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 13,87 persen dan kalau untuk sarana dan prasarana kementerian itu kurang lebih sepuluh 10,5 milyar. Tidak banyak memang. Lalu dari itu semua kami juga sudah diminta oleh Departemen Keuangan untuk melakukan efisiensi. Efisiensi terhadap kegiatan perjalanan dinas dan konsinyering rapat-rapat, dan besarnya mencapai 51,67 persen atau sekitar 50 persen dari anggaran yang kami ajukan untuk konsinyering dan perjalanan dinas sebesar 69 milyar. Sehingga dengan penghematan tinggal 35,6 milyar. Penghematan yang dilakukan kurang lebih setelah revisi 33,3 milyar.

ohonan dan dukungan dari Komisi II DPR. Agar penghematan tetap bisa dicadangkan di kementerian. Pertama akan kami sar 23 milyar, dengan self assesment dan yang kedua untuk re-focusing (penajaman) kegiatan sebesar 12 milyar. Jadi kami lakukan penghematan nomenklaturnya kami sesuaikan batasan-batasan penggunaannya sesuai dengan yang ada di sini, namun kita cadangkan tidak langsung hilang. Kira-kira begitu, namun ini semua kami serahkan kepada Pimpinan Komisi II. Kiranya kami bisa mendapatkan persetujuan dan dukungan. Kurang lebih itu yang bisa kami laporkan secara garis besar, selebihnya kami siap mendengarkan masukan-masukan dan saran dari yang terhormat Anggota Komisi II.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri, sangat efisien penyampaian dan kita memang membahas pada tanggal berapa ya? 6, 7, 8 untuk kita simulasikan beberapa hal yang tadi menjadi,

#### **MENTERI PANRB:**

Pimpinan mohon maaf sedikit ada yang lupa. Dan untuk hal-hal yang sifatnya lebih teknis mendetil untuk masing-masing penggunaannya kalau ada revisi dan catatan-catatannya nanti kuasa pengguna anggarannya sudah saya serahkan kepada sekretaris kementerian, dan biro perencanaan. Jadi menteri tidak lagi mengurus urusan detail mengenai angka. Jadi silakan nanti anggota dewan kalau ada hal-hal yang lebih teknis pada pertemuan yang lebih terbatas bisa membedah itu. Sekian terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya memang tradisinya sudah begitu Pak Menteri ya. Jadi kita nanti bahas pada tanggal 6 7, 8. Terima kasih. Berikutnya, mungkin Kepala BKN, dan lebih nyambung dulu. Ini unik ini harus direkam dalam sejarah ini jadi pembicaraanya mundur ke belakang dan itu kalau dipublikasi itu mungkin ada keprihatinan kepada DPR untuk pertama kalinya *gitu* ya lya. Biar rasa masyarakat juga lihat kita ini prihatin.

Silakan Pak.

#### **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI (Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, M.SIS.)**

Terima kasih Bapak Pimpinan sidang,  
***Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.***

Selamat Pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Ketua Komisi II; Para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi II DPR RI;  
Yang terhormat Bapak Menteri PAN;  
Ketua Ombudsman RI dan hadirin yang saya hormati.**

Langsung saja masuk ke materi, Bapak Pimpinan jadi kami akan menyampaikan mengenai pagu anggaran untuk BKN pada tahun 2015. Pagu anggaran ini sudah menampung perubahan mandat berdasarkan Undang-undang ASN bagi BKN dan juga untuk menjalankan beberapa pekerjaan yang dilimpahkan oleh presiden dengan Kepres yang baru. Jadi kalau sebelumnya kenaikan pangkat IV/c ke atas dan pensiun IV/c ke atas itu dilakukan di di kepresidenan, itu sekarang sudah diturunkan ke BKN. Jadi kami juga mengusulkan untuk itu.

5 awalnya berjumlah 603 milyar kemudian BKN mendapatkan  
untuk penambahan gaji pokok pegawai sebesar 6 persen dan  
ng Rp.5.000,- . Sehingga total pagu keseluruhan untuk BKN  
sebesar Rp.614.132.754.000,-. Pagu sebesar ini digunakan untuk membiayai 3 program RPJM.

Yang pertama adalah program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 421,489 milyar. Yang rinciannya adalah untuk belanja pegawai itu sebesar 309,6 milyar untuk membiayai sebanyak lebih kurang 2.791 pegawai. Gaji pegawai ini sebesar 190,151 dan tunjangan kinerjanya sebesar 116,535 milyar. Kemudian ada belanja operasional ini sebesar 73,6 milyar ini untuk pemeliharaan dan juga untuk membayar biaya rutin seperti listrik dan air, kemudian ada belanja non operasional sebesar 3,8,174 milyar.

Yang kedua adalah program peningkatan sarana dan prasarana sebesar 70,255 milyar ini untuk pengadaan sarana dan prasarana baik di kantor pusat BKN di Jakarta maupun seluruh kantor regional di Indonesia, ada ada 14 kantor regional dan ada 2 kantor regional yang baru diresmikan satu di Papua Barat Manokwari, dan satunya di Propinsi Aceh di Banda Aceh. Jadi ada 2 yang baru yang membutuhkan prasarana yang belum terbangun di sana.

Yang ketiga adalah program penyelenggaraan management kepegawaian. Ini jadi tugas pokok dari BKN untuk melaksanakannya sebesar 122,387 milyar. Adapun efisiensi untuk perjalanan dinas dan konsinyering yang berhasil kita lakukan adalah sebesar 16 milyar koma 16. 16,16 milyar dan ini kami dapatkan dari efisiensi berbagai kegiatan yang ada di BKN. Sehingga kemudian pagu untuk tahun 2015 berubah untuk program dukungan management awalnya 421,489 milyar menjadi 417,318 milyar. Untuk program peningkatan sarana dan prasarana ini awalnya 70,255 berubah menjadi 76,389 milyar dan untuk program menyelenggaraan managemen kepegawaian negara yang awalnya atau semula 122,387 milyar menjadi 120,424 milyar jumlahnya sama, masih sama persis.

Kemudian usulan tambahan anggaran untuk tahun 2015 kami mengusulkan dalam waktu 5 tahun kami mendapatkan tambahan 69,6 milyar namun khusus untuk tahun 2015 ini kami mengajukan tambahan anggaran sebesar 11,4 milyar ini akan kami pergunakan untuk pertama kegiatan sensus pegawai secara elektronik sebesar 3,2 milyar, kegiatan assessment system PNS ini untuk melakukan assesment kepada hampir seluruh pejabat tinggi, pejabat pimpinan tinggi pemerintahan sebesar 2,1 milyar, kemudian ada pelayanan kepangkatan dan mutasi ini yang merupakan limpahan dari kantor kepresidenan sebesar 2,3 milyar dan kegiatan pelayanan pensiun ini juga merupakan limpahan dari kantor kepresidenan kepada kami, karena sebelumnya ditandatangani oleh presiden, sekarang ini yang menandatangani adalah kepada BKN sebenar 3,8 milyar.

Untuk realisasi pagu anggaran tahun 2014 BKN mampu menyerap 91,5 persen dari anggaran. Jadi ada sisa sebesar 61,695. Ketidak terserapan anggaran ini sebagian besar pada belanja pegawai karena kami tidak berhasil mendapatkan atau belum berhasil mendapatkan hasil reformasi birokrasi pada tahun lalu. Kami harapkan pada bulan, bulan ini kami sudah mendapatkan hasil dari analisis terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN, sehingga tunjangan kinerjanya sudah dapat dibayarkan pada tahun ini.

Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

***Wassalammua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT**

***Wa'alaikum salam.***

Terima kasih Bapak Kepala BKN, jadi kita lanjutkan saja untuk secepatnya pada Ombudsman Republik Indonesia monggo Pak. Ini naik pangkat ke atas Pak.



Terima kasih Bapak Pimpinan

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II yang kami hormati.**

Memang sudah tepat rasanya Ombudsman diberi jatah nomor 3 setelah Pak Menteri PAN dan Kepala BKN. Karena dari produk-produk kebijakan Kementerian PAN dan BKN Ombudsman menjadi, menjadi bagian dari mengawasi implementasinya, jadi kami itu bersinergi dengan Menpan terus menerus. Karena kebijakan-kebijakan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Bapak Pimpinan tanpa bermaksud mengurangi substansi dari RDP kita hari ini, mohon ijin kami bisa langsung membaca dalam konteks pointer yang sudah kami haturkan sebagaimana sudah kami distribusikan kepada Bapak Ibu pimpinan. Ada beberapa pointer terpenting yang kami haturkan tetapi yang lebih penting dari itu adalah kami perlu menyampaikan bahwa Ombudsman terkait dengan rencana anggaran yang kami butuhkan tahun 2015, sebagaimana sudah kami haturkan melalui surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala BAPPENAS pada tanggal 19 Desember tentang kebutuhan belanja prioritas nasional dalam RAPBNP 2015 dengan usulan tambahan pada intinya masih membutuhkan kebutuhan APBN Ombudsman sebesar 185 milyar lagi. Rasionalitas yang kami haturkan dalam kepentingan itu adalah ada di poin 3 bahwa Ombudsman sejak tahun 2012 memang sudah pernah meningkat jumlah anggarannya sebesar 4 kali lipat tapi baseline-nya pada waktu itu 16 milyar, kemudian menjadi 54 milyar sampai dengan tahun 2013.

Hal ini menjadi konsen besar buat ombudsman karena setelah kami menjalankan kewajiban untuk membentuk kantor-kantor perwakilan Ombudsman di 32 provinsi yang sudah ada yang kami sudah bentuk itu kami mengalami shock kekurangan biaya yang cukup parah karena sejak tahun 2013 setiap kantor perwakilan kami di masing-masing provinsi hanya bisa kami alokasikan anggaran sebesar 450 juta-an untuk satu kantor perwakilan yang membawahi sekian puluh kabupaten dan kota di dalam provinsi tersebut. Dan situasi itu tidak menjadi lebih baik pada tahun 2014 karena berkurang menjadi masing-masing kepala kantor perwakilan hanya mengalokasikan anggaran sebesar 300 juta. Dan kami lebih khawatir lagi untuk tahun 2015 bila tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam APBNP Ombudsman, maka kantor-kantor perwakilan setelah bertambah dengan 32 total jumlah kantor perwakilan itu, mendapatkan alokasi anggaran sejumlah nantinya menjadi kurang lebih 260 juta per kantor perwakilan yang membawahi sekian puluh kabupaten kota.

Karena itu kami mohon dengan sangat dukungan Bapak Ibu yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi II untuk bisa membantu kami dalam rangka menambahkan APBNP Ombudsman di tahun 2015 ini sebagaimana usulan yang kami sudah haturkan secara tertulis kepada Bapak, Ibu yang kami hormati, untuk apa kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kami membutuhkan anggaran sebesar itu.

Bapak, Ibu yang terhormat izinkan kami menyampaikan beberapa poin, poin 5 huruf a kami sampaikan bahwa jumlah laporan pengaduan masyarakat, partisipasi publik yang mengadu melalui Ombudsman terkait pelayanan publik yang diselenggarakan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu meningkat hampir 400 persen dalam 2 tahun terakhir. Artinya ada lipatan jumlah laporan pengaduan yang perlu harus kita tindaklanjuti dalam bentuk penyelesaian laporan itu antara 380 sampai 400 persen. Jumlah ini tidak bisa kita abaikan Bapak, Ibu sekalian, karena semakin tereduksi masyarakat mereka akan semakin kritis terhadap kualitas pelayanan publiknya, sehingga di daerah-daerah tertentu kantor-kantor perwakilan kita di mana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di situ sudah cukup baik, maka jumlah pengaduan relatif akan naik, termasuk juga yang di DKI Jakarta.

Sampai dengan hari ini data tahun 2014 Bapak Pimpinan, jumlah pengaduan yang masuk kepada Ombudsman sekitar 6.700 pengaduan dan itu terdiri dari pengaduan-pengaduan yang sifatnya sangat sistematis, bukan pengaduan yang aksidental dan sangat sederhana tapi mulai yang sangat

an tentang kebijakan atau prosedur pelayanan investasi untuk

aturkan disamping terus melakukan penyelesaian tugas-tugas penanganan pelaporan dari masyarakat, Ombudsman juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya on motion investigation sifatnya tanpa pengaduan tetapi Ombudsman melakukan kajian-kajian terkait dengan kondisi faktual pelayanan publik yang ada. Salah satu contoh yang menarik misalnya adalah pelayanan publik di bidang perizinan investasi mikro dan menengah, kalau Bapak Ibu yang terhormat, barangkali sempat mendengar berita tentang on motion investigation-nya Ombudsman yang kita lakukan tentang perizinan investasi di Bandung dan di Surabaya dan menimbulkan satu pergerakan perbaikan kualitas yang luar biasa di mana Ibu Walikota, Ibu Risma dan kemudian Pak walikota Bandung menyikapi hasil temuan Ombudsman tersebut secara diam-diam, secara terstruktur kita video-kan dan kedua walikota tersebut sudah merubah sistim pelayanan dengan sangat luar biasa. Itu adalah bagian dari kegiatan Ombudsman.

Proses-proses yang lainnya dilakukan Ombudsman tanpa melalui pengaduan misalnya terkait juga dengan dualing time pelabuhan dimana kita juga melihat bagaimana logistik cost Indonesia itu masih menjadi yang terendah di Asian sehingga Ombudsman merasa harus ikut di dalam proses monitoring terkait penyelenggaraan pelayanan publik sektor pelabuhan. Juga misalnya Ombudsman melakukan investigasi terkait dengan terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 yang kemudian menjadi polemik cukup parah pada tahun lalu, di kepulauan Riau dan khususnya Batam dimana daerah-daerah tertentu yang sudah di terbitkan perpres 87 tahun 2011 terkait dengan kawasan ekonomi terpadu di kota Batam, kemudian menjadi daerah yang sepenuhnya hutan *gitu* karena terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan dan Ombudsman menyelesaikan itu dengan rekomendasi Ombudsman.

Bapak, Ibu sekalian, yang menarik dari kajian-kajian yang dilakukan Ombudsman adalah temuan Ombudsman pada tahun 2014 yaitu implementasi Undang-undang Pelayanan publik Undang-undang 25 tahun 2009. Itu ternyata di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu masih sangat rendah, sehingga kami menyampaikan konsern ini kepada Bapak Menpan juga pada waktu itu terus kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini dengan memberikan target kepada Ombudsman untuk membantu memfasilitasi dan mengobservasi, sehingga tingkat implementasi Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik nantinya di tahun 2019 pada tahun 2015 bisa mencapai angka-angka kurang lebih seperti ini. Ini sudah masuk dalam RPJMN kita saat ini Bapak, Ibu sekalian. Tingkat implementasi Undang-undang 25 tahun 2009 di tingkat kementerian adalah 85 persen target ini, di lembaga negara dan lembaga pemerintahan 50 persen, di pemerintah provinsi 100 persen, dan pemerintah kabupaten kota 20 persen.

Kami memahami betul bersama dengan diskusi kami dengan Bapak Menpan bahwa begitu banyaknya buruknya kualitas pelayanan publik karena standar implementasi pelayanan publik melalui Undang-undang 25 ini masih sangat rendah, maka ini yang kita kejar sehingga implementasi kepatuhan entitas pemerintah penyelenggara pelayanan publik itu bisa meningkat dalam waktu secepat cepatnya. Nah tahun ini Bapak Ibu sekalian sebagian anggaran yang kami mohonkan melalui bahwa Ibu yang terhormat itu kita pergunakan untuk ini, menyelenggarakan program pengawasan dan fasilitasi terhadap implementasi Undang-undang 25 tahun 2009. Ombudsman juga dikenakan sebuah target yaitu tentang perbaikan pelayanan publik, kualitas maksudnya, kualitas pelayanan publik, dengan target 46 perbaikan kebijakan Pelayanan Publik. Empat puluh enam (46) yang mana saja nanti kami bisa haturkan di dalam satu meeting yang lebih teknis Bapak, Ibu sekalian. Kami sudah menyampaikan pointer-pointer terpenting 46 sektor kepada pemerintah yang mana saja, itu terdiri dari setidaknya dari 6 sektor utama.

Bapak, Ibu sekalian, dalam hal ini kami haturkan dokumen yang saya kira sudah ada di meja Bapak, Ibu kalian, tetapi pada intinya Bapak, Ibu sekalian poin 9 kami berharap betul memohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Terkait dengan pagu anggaran dan kebutuhan anggaran Ombudsman pada tahun 2015 ini sebagaimana kami sudah haturkan bahwa saat



memiliki komposisi APBN sebesar 66,270 juta. 66 Milyar 270 juta ini sebesar 25 milyar, belanja barang 39 milyar, dan belanja pegawai 25 milyar. Menurut Pak Men-PAN soal ini karena komposisi belanja pegawai tampaknya tidak sehat dengan komposisi belanja barangnya, tapi ini situasi yang saat ini kami hadapi. Karena itu kami mengharapkan betul agar pada tahun 2015 kami memiliki APBNP, sehingga kita bisa mengelola anggaran untuk belanja pegawai masih kurang 1,568 milyar, belanja barang kami butuhkan 100 milyar koma 690 juta, dan belanja modal 83 milyar 377 sehingga totalnya 185 milyar.

Perlu kami sampaikan ke hadapan Ibu pimpinan sebagian besar dari seluruh APBNP yang kami harapkan adalah belanja program dan hanya sedikit yang belanja modal. Artinya bapak ibu sekalian kami memang membutuhkan maintenance dan belanja modal terkait dengan kantor-kantor perwakilan kita di daerah, tetapi kami tidak membeli aset-aset tanah baru. Kami mengharapkan bisa menggunakan, memanfaatkan aset-aset pemerintah yang idle. Contohnya kami sudah mendapatkan 3 lokasi di perwakilan DIY, di Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan, aset milik pemerintah pusat milik BPKP yang kemudian diserahkan kepada Ombudsman dan kami tinggal membangun sarana fisiknya.

Bapak, Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami haturkan, kami dengan senang hati bisa menyajikan paparan rencana itu secara lebih detil dalam kesempatan dialog kita. Atau nanti ketika pada tanggal 6, 7, 8, kita jadi meeting teknis, kita bisa haturkan secara lebih detil.

Demikian terima kasih, Bapak Pimpinan.

***Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

#### **KETUA RAPAT**

Terima kasih, Pimpinan ORI untuk, mempersingkat waktu kita punya 35 menit ke depan untuk memperdalam dan mohon para anggota dewan yang terhormat dalam pendalaman ini mungkin lebih kepada hal-hal yang strategis terkait anggaran. Nanti yang lebih teknis kita bahas pada rapat konsinyering pada tanggal 6, 7, 8. Saya bebas saja karena ini tidak usah per fraksi. Sebelah kanan dulu saya Pak Yandri dulu, tadi Pak Yandri, lalu sebelah kirinya Pak Sirmaji ya. Ini 2 dulu nanti lanjut kita.

#### **F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):**

Mulai Pak ya? Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Biar di daftar oleh sekretariat, oleh sekretariat boleh disebarkan.

#### **F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):**

Ya Terima kasih Pimpinan.

***Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**Pimpinan yang saya hormati;  
Anggota Komisi II;  
Pak menteri beserta jajaran;  
Kepala BKN dan Kepala ORI beserta jajaran;  
Hadirin yang berbahagia.**

Menpan tadi saya kira sangat bagus terhadap anggaran yang berjalan, termasuk yang akan diajukan terhadap APBNP 2015. Men tadi bahwa khusus untuk tenaga honorer kita akan dibahas secara detil dalam forum terbatas mungkin, saya kira itu juga sangat bagus, karena komitmen dari keputusan kesimpulan rapat pada Minggu yang lalu tapi begini Pak Men-PAN, karena penganggaran dalam APBN itu hanya 2 kali yang dikenal, ada APBN normal dan APBNP (Perubahan). Nah kalau misalkan kemarin kita sudah sepakati tahun 2015, itu ada penyelesaian tenaga honorer K2, menurut saya karena tidak ada celah dalam hal penganggaran mungkin masih ada waktu Pak Men-PAN untuk tanggal 6, 7, 8, kita konsinering itu sesuai dengan keputusan rapat kemarin kesimpulannya bahwa bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan K2 itu adalah penganggaran. Nah penganggaran ini artinya bagaimana kita menyelesaikan yang 400 ribu lebih itu.

Menurut saya mungkin Komisi II akan mendukung itu Pak Men-PAN, kalau misalkan ada usulan dari Men-PAN untuk menganggarkan tentang penyelesaian secara baik, secara terstruktur atau secara masif tentang penyelesaian K2. Kami pasti mendukung itu Pak Men-PAN, karena kalau tidak kita anggar di APBNP ini maka kita akan ketemu di Agustus, Oktober untuk membahas APBN 2016. Nah ini juga akan menyelesaikan, apa namanya sebuah persoalan bagi kita. Oleh karena itu Pimpinan Komisi II dan rekan-rekan yang lain saya kira kita mendorong Men-PAN untuk menganggarkan tentang penyelesaian tenaga honor itu sehingga kelihatan apa namanya kemauan kita secara bersama itu menyelesaikan tenaga honor K2 itu.

Nah kalau tadi misalkan penghematan terhadap perjalanan dinas sebesar 35 milyar itu menurut saya luar biasa, tapi langsung digunakan dengan ajuan terbaru. Itu juga kami setuju Pak Men-PAN, itu artinya bagi kita untuk menaikkan, apa namanya, tunjangan aparat kita itu sangat bagus *gitu lho*, tetapi ada PR besar kita di luar artinya tunjangan itu diiringi juga dengan penyelesaian masalah di luar *gitu*. Oleh karena itu harapan kami tidak ada kata lain kita harus menganggarkan penyelesaian tenaga honorer K2. Kalau itu tidak ada, berarti kita cuma main-main saja dengan keputusan rapat kemarin Pimpinan. Nah itu yang sama maksud.

Kemudian yang kedua Pak Men-PAN, mohon maaf ini dari apa namanya, DPR ini tetap akan mungkin konsinering misalnya di hotel apakah nanti Pak Men-PAN juga mengutus orang ke hotel itu, kan ini jadi masalah kan! tapi harapan kami itu tidak menjadi sebuah persoalan, intinya ya karena sudah ditentukan di Hotel Milenium, katanya kan? jadi karena kalau di DPR sendiri mungkin keterbatasan lain satu hal, Nah oleh karena itu mungkin harap maklum Pak menteri nanti kalau kami mengadakan di hotel, itu demi konsentrasi juga sebenarnya. Itu yang pertama untuk Pak Men-PAN dan Reformasi Birokrasi memang anggaran Men-PAN terlalu kecil sebenarnya, Pimpinan. Cuma satu Dirjen saja nggak sampai kalau di PU atau pun di Pertanian kan cuma 250 milyar mau mereformasi birokrasi yang 4 juta sekian itu bagaimana sebenarnya ya kan? saya juga prihatin sebenarnya, tapi ya cobalah mungkin kalau misalkan ada usulan yang sifatnya revolusioner untuk mereformasi birokrasi saya kita Komisi II akan men-support itu Pak Menteri, karena itu adalah kebutuhan kita semua. Tapi sekali lagi titip K2 mesti kita selesaikan juga. Itu yang pertama.

Kemudian yang untuk Ombudsman ini. Pak Dadang saya termasuk yang paling keras waktu itu Pak, Bu Sekjen dengar itu waktu kita di Milenium juga. Saya yang paling tidak setuju kalau anggaran cuma 66 milyar waktu itu. Ternyata Menteri Keuangan tidak juga setuju terhadap 250 milyar itu kan Bu? nama makanya saya nggak tahu *gimana* lobby Pak Dadang ini sebenarnya dengan Menteri Keuangan, ya kan? karena saya kunjungan ke Bali kemana-mana itu memang memprihatinkan ORI itu Pak, Bu. Ya ini, jadi menurut saya komitmen kami untuk menyetujui itu tidak perlu diragukan lagi Pak Dadang, karena itu menjadi kebutuhan kita semua, tapi mungkin outputnya juga harus jelas ya kan. Saya tahu kalau yang Pusat ini luar biasa, tapi mungkin di provinsi-provinsi itu perlu progres-lah, Pak Ketua, jadi mungkin perlu disampaikan kepada kami apa, apa namanya, kemajuan-kemajuan ataupun catatan capaian yang harus selama ini di terhadap 33 perwakilan itu, *gitu lho*. Kecuali Kaltara yang belum dibentuk. Dan itu memang komitmen kita supaya ORI itu ada di semua propinsi. Bahkan harusnya di kabupaten kota, *gitu lho*. Nah jadi kami setuju dengan anggaran itu kalau perlu lebih besar lagi Pak

...k setuju kan Bu? Ya kan? kita ini berharap terlalu banyak di  
...h juga kita. Jadi menurut saya, saya tetap tidak akan berubah  
...supaya 256 milyar itu disetujui, di hotel millenium waktu itu.

ternyata Menkeu tidak menyetujui.

Jadi itu mungkin dari saya pimpinan, intinya memang Komisi II ini komisi yang anggarannya kecil-kecil tapi bebannya sangat berat ya kan? Pelayanan publik hampir semua tertumpu di Komisi II tapi anggarannya terbatas. Menurut saya juga Komisi II atau khususnya pimpinan juga harus melobby Menteri Keuangan atau Menteri terkait supaya merelakan bahwa layanan publik itu kalau kita maksimal kan hasilnya juga mungkin di kelembagaan Kementerian lain juga akan maksimal hasilnya, tapi kalau birokratnya atau aparatnya tidak benar anggaran besar itu makanya selama ini banyak menguap. Jadi Pak Men-PAN saya kira tidak perlu ragu Pak ajukan saja yang agak besar Pak, kita kawal nanti ya. Tapi sekali lagi Pak K2 kita selesaikan, itu saja Pak, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Yandri itu saya ralat sedikit, mungkin Pak Danang ya. Pak Danang ya, kalau Pak Dadang itu di sebelah sini nanti. Jadi nanti sehabis Pak Sirmaji Pak Dadang ya? Pak Sirmaji dulu, silakan.

**F-PDIP (Drs, SIRMAJI, M.Pd):**

Terima kasih.

***Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Pimpinan dan Pak Menteri berserta Pimpinan Ombudsman yang saya hormati.

Jadi menambahkan tadi mengenai K2 ini. Jadi selain kepastian anggaran, prinsip nya K2 ini mesti harus tuntas betul. Karena ini betul-betul makan hati. Saya ini pernah sebelum di DPR RI ini kebetulan saya anggota DPRD provinsi, bahwa urusan K2 ini mereka sudah istilahnya itu sudah terlantar-lantar lama sekali baik pengabdiannya, maupun ada sebagian yang kebetulan tidak masuk data base akhirnya menjadi terlantar dan seterusnya, jadi sudah sangat panjang. Oleh karena itu kami menggarisbawahi selain faktor budgeting yang mesti harus dituntaskan sehingga Desember nanti kita bisa yakinkan final. Itu juga road map-nya Pak tanggal 6, 7 nanti mesti harus kita, kita paling itu garis besarnya karena tanggal setelah tanggal 18 kita akan reses lagi. Sehingga nanti akan ditagih lagi jan sa' repotan itu kalau ditagih itu. Artinya malulah kita tidak bisa memberikan kepastian. Jadi saya kira mengarisbawahi saja itu, jadi DPR RI Komisi II saya kira komit semuanya untuk, untuk memperjuangkan bagaimana supaya persoalan K2 ini tuntas baik dari regulasi maupun penganggarannya.

Yang kedua terhadap ORI, saya kira ORI perlu menginformasikan ke kita juga berbagai daerah di provinsi-provinsi itukan ada semacam komite pelayanan publik. Ya. komisi, misalnya Jawa Timur di Jawa Timur itu punya komisi pelayanan publik juga ya, yang aktivitas plus minus sama dengan ORI ini. Nah bagaimana sinerginya atau daerah mana yang ada dan lain sebagainya ini perlu menjadi tambahan masukan kepada Komisi II supaya ke depannya di dalam memperjuangkan anggarannya itu bisa lebih pas begitu lah. Kira-kira daerah mana, provinsi mana yang mesti bisa ditempuh melalui sinergi dan provinsi mana yang mesti harus ORI berjuang sendirian dalam tanda kutip "sendirian". Terima kasih.

aling pagi kata beliau tadi datangnya.

Oh begitu? Jadi ke teman sebelah kang Dadang?  
Gimana?

**F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):**

Pak Asikin katanya.

**F-GERINDRA (Dr. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan,  
***Assalamua'alikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Selamat pagi,  
**Bapak Menteri yang kami hormati beserta rombongan;  
Bapak Ketua ORI dan BAKN, BKN yang kami hormati.**

Beberapa bulan yang lalu kami ditugaskan untuk melaksanakan reses di beberapa Kabupaten, khususnya di Dapil kami tujuannya adalah menjaring aspirasi masyarakat ini perintah konstitusi. Kami melaksanakan tugas itu kurang lebih 20 hari. Dari hasil reses kami aspirasi yang kami bawa ke tempat ini antara lain apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan K2 dan K1. Yang menjadi masalah Pak Menteri ada Kabupaten yang kami terima beberapa hari yang lalu, dengan Pak Arman yang diatur langsung oleh Ketua DPR nya dan Sekdanya di tempat ini, yaitu Kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan ini Selayar Pak, sudah bisa menjadi negara karena dia kepulauan tersendiri. Permasalahannya saya nggak tahu apakah BKN, atau ada pihak ketiga yang melaksanakan uji kepegawaian itu dia telah mengumumkan K2 yang sudah lulus dan sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah terhadap kelulusan tersebut.

Oleh sebab itu Pak Menteri, walaupun Pak Menteri tadi katakan kita akan bicara secara teknis tapi saya pikir hal ini harus ditangani memang oleh Pak Menteri dan Kepala BKN kalau memang belum jelas posisi kelulusan yang bersangkutan, jangan diumumkan, kalau memang belum jelas anggarannya, belum jelas dan lain sebagainya, jangan diumumkan. Karena ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Yang kedua Pak Menteri yang kami hormati. Bagi kami terus terang kami sampaikan bahwa apa yang di sampaikan teman-teman terkait dengan K2 tidak ada pilihan lain untuk mundur kecuali maju terus dan saya yakin teman-teman di DPR akan memberikan dukungan untuk menyiapkan anggaran demi kepentingan bangsa yang tercinta khususnya yang ada di K2. Kami tidak punya nilai lagi kalau kami kembali karena K2 ini tidak terselesaikan oleh sebab itu bagi kami anggota DPR yang ada di sini pertarungan kepercayaan kami di masyarakat terkait dengan K2 tersebut.

Yang terakhir Pak Menteri aspirasi dari teman-teman bupati, tidak tahu tidak tahu siapa yang mengatur ini, pensiun bupati, pensiun bupati ini sangat tidak rasional menurut mereka kalau dibandingkan dengan pensiun-pensiun lain, apalagi terobsesi dengan adanya kebijakan Pak Ahok yang menaikkan gaji berapa kali lipat bagi Pegawai Negeri ya, 1,2 juta yang 10 tahun itu berapa? 1,7 juta?

**F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):**

1,7 juta.

(M.Si):

...tuta setengah mati ini pensiun bupati semua ya? kalau toh nilai rupiahnya kurang ya kasihlah dia penghargaan ya. Ini mungkin, saya tidak tahu apakah Pak Men-PAN atau BKN yang mengatur ini mungkin ini perlu ditinjau kembali. Terima kasih.

***Billahi fisabilhaq Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Itu jeritan hati nurani itu Pak tadi. Sebelah kiri dulu, Pak Saan ya!

**F-PD (SAAN MUSTOPA, M.Si):**

Terima kasih.

***Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

**Ketua dan Anggota Komisi II yang saya hormati;  
Pak Menteri, Ketua Ombudsman dan dari BKN.**

Pertama saya ingin sampaikan bahwa reformasi birokrasi itu kan kunci pelayanan publik yang berkualitas, kedua juga kunci terwujudnya dan pemerintahan yang bersih good governance. Nah untuk bisa mewujudkan itu tentu apa juga harus didukung oleh anggaran yang memadai, maka untuk itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih ini Pak Menteri juga tidak apa sudah menunjukkan road map yang akan menuju ke arah sana dengan desain program dan sebagainya. Nah tentu kami dari Komisi II tidak akan ragu untuk mendukung apa permintaan anggaran yang diajukan oleh Menteri.

Jadi menurut saya disampaikan saja dan tentu kami akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar anggaran tambahan untuk Men-PAN ini terus bertambah, karena kita tidak mungkin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kalau reformasi birokrasinya itu mandeg. Itu satu hal yang ingin kami sampaikan.

Nah yang kedua terkait dengan persoalan yang memang sudah lama menyangkut nasib K2, itu memang perlu kita membikin komitmen bersama kalau hanya diskusi tanpa didukung oleh anggaran yang kita tetapkan bersama itu persoalan K2 itu hanya menjadi wacana aja yang tidak memang terselesaikan. Nah menurut saya Komisi II dan Men-PAN itu perlu menyampaikan kepada Menteri Keuangan dalam pembahasan RAPBNP ini, untuk bisa dianggarkan. Berapa kemampuan Menteri Keuangan untuk menganggarkan untuk gaji K2 kalau diangkat menjadi PNS. Misalnya tidak bisa selesai tahun ini tapi minimal ini ada ada langkah, ada kemajuan. Memang misalnya kalau bisa selesai tahun ini akan di baik, tapi minimal tahun ini bisa kita mulai K2 itu secara berkala kita kurangi dan kita ini kan. Jadi, sehingga dalam satu dua tahun ini persoalan K2 ini selesai, sehingga Men-PAN bisa fokus, konsentrasi kepada program-program yang lain tanpa dibebani dengan persoalan-persoalan K2 yang terus menerus itu tidak tuntas-tuntas. Ini yang pada kesempatan ini, mumpung RAPBN ini sedang kita bahas secara bersama sama, tinggal nanti kita buat saja simulasi kira-kira dibutuhkan berapa? dan kemampuannya berapa? Untuk mengangkat K2 ini.

Yang berikutnya untuk ORI memang kalau kita ingin memperkuat lembaga Ombudsman, juga salah satu nya ya anggaran juga harus kita apa tambah, tidak mungkin dengan anggaran yang tersedia hari ini Ombudsman kita harapkan menjadi kuat sehingga bisa apa bekerja dengan maksimal. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan kami. Terima kasih Ketua.

***Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***



etua?

**KETUA RAPAT:**

Ya ini saya coba juga bagi dari partai.

**F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn):**

Perempuan dong Pimpinan. Perempuan Pimpinan. Perempuan dikasih kesempatan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Pak Yandri sudah duluan Bu Ami jadi...(suara tidak jelas)

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFHI A. MUTTY, M.Si):**

Saya sedikit dulu Pimpinan.

**KETUA RAPAT**

Ya, ya Semuanya nanti dapat Pak, Insya Allah, kalau bisa dipersingkat, kalau bisa dipersingkat yang terkait K2, misalnya, kalau memang komitmennya kira-kira itu, ya di ulangi boleh tapi jangan terlalu panjanglah kira-kira intinya kan sama begitu.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFHI A. MUTTY, M.Si):**

Oke, terima kasih Pimpinan,  
Bapak Menteri, Kepala BKN dan Ketua Ombudsman masing-masing beserta jajaran;

Pertama mengenai K2, saya ulangi lagi sedikit. Kita sepakat bahwa persoalan K2 ini harus diselesaikan, sekaligus kita selesaikan kita akhiri rejim tenaga honorer. Ini point pertama. Jadi K2 harus selesai, sekaligus mengakhiri rejim tenaga honorer. Tetapi saya punya persepektif lain dengan teman-teman Pak menteri, artinya penyelesaian K2 itu jangan diartikan semua K2 yang diusulkan oleh pemda akan diangkat itu tidak benar, karena kita akan menjebak negara ini menjadi negara pegawai, negara tidak punya uang untuk membayar seluruh orang-orang yang mau jadi pegawai. Di satu sisi masyarakat teriak, pemda teriak infrastrukturnya buruk. Jadi perlu ada verifikasi yang betul-betul hanya orang yang berhak yang memenuhi syarat yang boleh diangkat menjadi tenaga honorer, CPNS dari tenaga honorer. Jadi ini poin penting. Kita jangan menjadikan itu bahwa semua yang di usulkan. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan pada rapat yang lalu, banyak sekali tenaga honorer siluman diangkat oleh kepala daerah *incumbent* yang maju lagi menjadi calon bupati merekrut orang untuk menjadi tim sukses dan dijanji untuk jadi pegawai. Ini lah yang banyak menjadi diselundupkan menjadi tenaga honorer K2. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk BKN dan Men-PAN ini mengenai administrasi kepegawaian. Orang kalau mau pensiun itu ribetnya setengah mati apakah Menpan bersama BKN tidak bisa membuat suatu sistem kepegawaian dari sejak diangkat, mutasi, promosi sampai pensiun itu sifatnya otomatis? karena waktu saya reses kemarin banyak sekali teman yang tidak menerima gaji sudah sekian lama pensiun karena persoalan-persoalan administrasi. Saya kira setiap kali orang atau orang begitu diangkat jadi pegawai pertama kali, tembusannya kan ada ke BKN, dia naik pangkat ada ke BKN, mutasi ada ke

bersangkutan harus diminta lagi memfotokopi segala macam BKN! Apakah mumpung sekarang Pak Menteri ini melakukan siapkan anggaran secara bertahap supaya begitu orang mencapai usia pensiun langsung datang SK nya. Jadi tidak perlu lagi mengurus segala macam. Nah saya tidak tahu apa di negara lain terjadi hal seperti itu? karena kita ini, kita sudah melakukan komputerisasi di satu sisi, sistem kepegawaian elektronik di satu sisi, tetapi kita masih mengelola kepegawaian kita secara primitif. Masih diperlukan fotokopi segala macam, ada KTP ada ini, ada ini, ribet sekali itu Pak Menteri. Banyak sekali orang yang sudah pensiun bertahun-tahun tidak terima gaji pensiun. Nah saya harapkan ini perlu disusun ini Pak Menteri.

Kemudian untuk Ombudsman saya kira kinerja pemerintah secara keseluruhan di ukur dari tingkat kepuasan masyarakat, kan ada dua sistem administrasi besar di dunia ini: ada sistem administrasi publik ada sistem administrasi bisnis. Kalau sistem administrasi bisnis ukuran kinerjanya itu adalah seberapa banyak dia memperoleh keuntungan mengakumulasi modal. Administrasi publik ukuran kinerjanya seberapa jauh masyarakat puas dengan pelayanan itu, dan institusi instansi atau lembaga yang bisa mengawal, mengontrol, tingkat kepuasan publik itu adalah Ombudsman. Tapi kalau Ombudsman dengan anggaran yang sangat minim ini, saya sanksi ini Pak Danang. Saya sangsi apakah Ombudsman bisa mengawal, bisa mengontrol, bisa mengedukasi masyarakat, untuk mengetahui hak-haknya sebagai rakyat yang harus dilayani dengan baik oleh pemerintah. Saya kira perlu ada anggaran yang memadai untuk Ombudsman, untuk melakukan fungsi-fungsinya, agar supaya masyarakat memiliki tingkat kepuasan kepada negara.

Saya kira itu saja Pimpinan. terima kasih.

#### **KETUA RAPAT**

Lanjut.

#### **F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Pimpinan melanjutkan.

#### **KETUA RAPAT:**

Oh begitu.

#### **F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Lanjutkan sedikit saja tidak terlalu anu.

#### **KETUA RAPAT:**

Sedikit Pak ya?

#### **F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Ya, terima kasih.

***Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Selamat siang, saya nama Syarif Abdullah anggota 29 dari Dapil Kalimantan Barat Pak. Yang pertama berkaitan dengan Ombudsman saya melihat sama dengan teman-teman yang lain kalau

lam sekarang kita menganut transparansi, untuk menjadikan i tentunya peran Ombudsman itu cukup strategis, tapi dilihat lum membumi *gitu*? Padahal persoalan-persoalannya cukup banyak ini, baik persoalan masyarakat, baik persoalan publik dan sebagainya itu, cukup banyak yang berkaitan dengan ini, terutama di Pegawai Negeri, banyak hak-hak mereka yang ya terzolimi dan sebagainya ini. Sebenarnya bagaimana supaya Ombudsman itu di ketahui oleh masyarakat, masyarakat tahu fungsi-fungsinya, mungkin perlu juga ya macam apa ya? iklan, supaya masyarakat tahu hak-hak dan kewajibannya ini.

Karena terus terang saja saya kemarin cari kantor Ombudsman pada waku saya pulang ke Kalbar itu caranya ya tempatnya yang begitu terpencil, ya sama juga waktu kami kunjungan ke Bali, bocor dan sebagainya ini juga tentu membuat, apa berkaitan dengan ini tentu harus menjadi perhatian kita, maka untuk itu dalam rangka membantu Pak Menteri yang sekarang sedang mereformasi birokrasi terutama, mungkin peran dari ORI ini cukup strategis *gitu* ya.

Yang kedua berkaitan, saya sependapat.

**KETUA RAPAT:**

Bisa dipersingkat Pak ya, tadi janjinya dipersingkat itu.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Ya, sama yang kedua saya cuma untuk menyampaikan lagi Pak Menteri untuk mempertegas, berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang lalu, tadi sudah singgung ternyata memang berkaitan dengan pegawai, lolos pegawai di salah satu Kabupaten di Kuburaya itu itu sudah lolos tahun 2010 kemudian 2010 ternyata dari Kemen-PAN pusat ini supaya ada penerimaan pegawai 2012. Ternyata oleh PTUN itu sudah dilarang keputusan 2010 supaya Men-PAN tidak membuka lagi pendaftaran, ini ada nanti saya serahkan kepada Pak Menteri semuanya, untuk itu tentu, bahkan ada jawaban Pak Menteri terakhir akan diselesaikan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, sekarang Mahkamah Agung. Nah sekarang Mahkamah Agung sudah melaksanakan putusan kami cuma ingin diselesaikanlah Pak persoalan berkaitan dengan seleksi PNS yang terjadi di Kuburaya yang tidak kunjung selesai pada hari ini. Untuk itu saya akan serahkan kepada Pak Menteri sekaligus juga pada hari ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Zul, nanti sebelah sana Ibu Ami, saya kira setuju Ibu Ami ini kita beri kesempatan khusus ya?

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Pimpinan tadi jam 12 pimpinan, nanti pas saya jam 12 berhenti, lebih baik Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Satu Menis Saja Pak Zul.

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Saya? ya oke sayaini patuh kok. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Ketua ORI, Ketua BKN, saya langsung saja tidak basa-basi, K2 saja. Sesuai apa yang saya sampai kan pada saat pertama kita

dan sesudah itu memberikan dorongan, kalau anggaran tidak  
putusan saya putusan bapak-bapak ini maunya apa? Pak,  
bapak, bola panas ini. Informasi saya sampaikan bahwa semua

berita ini kuncinya ada di Menpan, karena Komisi II sudah menyampaikan, jadi awas Pak di sinilah  
kalau bapak mau diuji, kalau soal reformasi-reformasi nggak jadi perhaian itu yang pertama.

Yang kedua saya hanya menambahkan saja ini berdasarkan bukan cerita, pengalaman.  
Pengalamansoal siluman tadi Bang Lutfi. Betul modusnya Pak kalau tadi ada kepentingan untuk politik  
tapi modusnya yang pasti mereka itu memundurkan tanggal pengangkatan, supaya masuk database.  
Jadi walaupun kita kejar terburu-buru dengan suatu komitmen sekian waktu selesai, selesai itu betul-  
betul selesai yang bersih dan objektif. Jadi saya ini hanya memberikan informasi saja kepada Pak  
Menteri, kasihan juga Pak Menteri benar-benar tidak tahu dari bawahnya yang dobel siluman tadi itu  
Pak Lutfi betul, cara modusnya memundurkan tanggal pengangkatan, misalnya 2005 Desember,  
mundur kan 2005 Januari, itu pertama.

Kedua ini hanya berbagi cerita saja dan pengalaman. Saya dulu Pak, ada istilah di luar K2 ini  
ada PGHM. Jadi Persatuan Guru Honor Murni itu yang tidak diangkat oleh pemerintah daerah. Itu  
diangkat oleh kepala sekolah, diangkat oleh kepala dinas yang tidak oleh Kabupaten. Ditempat saya  
dulu penah sampai 6.000 Pak. Nah di sinilah kita diminta kemauan, kasihan Pak mereka itu dibawah  
mencerdaskan anak-anak kita di desa-desa cuma dapat uang 50.000,- akhirnya dengan segala cara,  
maaf bukan promosi, kemauan, saya entah memotong anggaran dari mana, minta dari mana mereka  
saya kasih tambahan honor. Bukan pengangkatan, honor yang tadi 50.000 saya jadikan 200.000,-  
sesuai dengan ininya, tapi betul-betul saya panggil kepala dinas, kepala sekolah betul dia sudah sekian  
tahun, berapa tahun. Jadi kembali Pak Menteri ini nama Pak Menteri di pertaruhkan, karena sekarang  
maaf ngomong kalau malaikatnya sekarang tinggal bagaimana Pak Menteri, selesai Pak menteri hebat  
tidak Pak Menteri rusak, Terima kasih Pimpinan

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabrrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ibu Ami silakan.

**F-PPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI):**

Arwani daftar, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

PPP belum nanti ya?

**F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Menteri Men-PAN yang saya hormati, BKN dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.**

Saya tidak panjang lebar juga ini karena yang antri masih banyak pimpinan, saya pada  
prinsipnya untuk masalah K2 ini hampir sama seperti yang lain Pak. Cuma harapan saya Pak Menteri  
untuk penyelesaiannya mungkin bisa diusahakan untuk lebih cepat, tidak menunggu Desember 2015,  
karena begini bayangkan saja ya untuk pengusaha-pengusaha swasta saja Pemerintah bisa  
mengeluarkan kebijakan bahwa masa percobaan itu hanya 3 bulan lho Pak. Tapi kenapa negara  
sendiri tidak bisa berbuat itu, itu bayangkan saja guru-guru honorer itu sudah banyak yang menunggu

...a tidak pernah diangkat menjadi status pegawai tetap ini bisa kita juga siap kok bekerja keras. Nah saya juga sudah senang sekali kalau ternyata di situ ada Bu Rahma jadi staf khusus Bapak, karena beliau ini ibu kedua saya. Saya ini termasuk alumni kantor beliau ini, hasil gemblengannya beliau ini sekarang, makanya saya sudah jadi berhasil begini.

Nah kemudian yang kedua, untuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia saya rasa untuk memperkuat lembaga itu sendiri tidak cukup hanya untuk menambah anggaran saja pimpinan, saya usul Undang-undangnya tetap harus direvisi. Beberapa kewenangan Ombudsman yang sifatnya hanya sebatas rekomendasi harus ditingkatkan sampai dalam tahap eksekutorial itu baru kuat. Selain anggarannya yang ditambah. Kira-kira itu dari saya cukup, Terima kasih.

***Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pencerahannya Ibu Ami, Mas Bambang terus nanti Pak Arwani ya!

**F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan tentang K2 tadi saya mendengar statement dari Menpan saya mengapresiasi cuman saya agak khawatir manakala nanti pengangkatannya hanya di dasarkan pada usia pengangkatan CPNS sampai 35 tahun, saya khawatir sekali karena mereka saat ini masa kritisnya sudah banyak Pak Menteri ada yang sudah berusia 54 tahun. Walaupun ini nanti diangkat, itu kan tinggal beberapa tahun lagi. Tapi beri kesempatan mereka untuk bisa mengenyam sebagai Pegawai Negeri Sipil. Harapan saya tanpa klasifikasi karena semakin tua mereka pengabdianya semakin banyak. Tolonglah dikasih nilai, sehingga harapan saya ketika mereka lolos seleksi administrasi angkat saja. Anggaran tinggal nanti kita komunikasikan dengan Komisi II. Komisi II semua pasti akan sepakat, nah saya khawatir.

Kemudian yang kedua Pak Menteri hari ini masuk koran lokal kalau saya beri judul SE Menpan menelan korban, jadi ceriteranya demikian anggota DPRD mengadakan kegiatan membuat jadwal tahunan di luar propinsi, hari ini pula mereka harus mengembalikan apa yang diterimanya. Para Anggota DPRD itu 3,9 juta masuk koran lokal. Harapan saya walaupun toh itu dilaksanakan itu kita yang konsisten jangan tajam di bawah tapi tumpul di atas, saya pun juga kaget kawan-kawan membahas di Millenium, Milenium sementara ini saya tahu kan di Jakarta, kita kan punya kantor kenapa harus di bahas di sana, walaupun memang itu diterapkan tolonglah jangan tajam di bawah tetapi tumpul di atas, konsisten saja Pak Menteri terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya lanjut Pak Arwani silakan

**F-PPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI):**

**Terima kasih Pak Menteri, Kepala BKN dan Ketua ORI beserta jajarannya; Pimpinan dan para anggota yang kami hormati.**

Saya Arwani Thomafi A-325 Dapil Jawa Tengah III, Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan dan Pati dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang pertama saya ingin menegaskan kembali soal K2 saya optimis ya, kalau melihat dari paparan yang disampaikan dan juga beberapa kebijakan



terus memberikan dorongan pada pemerintah untuk secara  
pelembagaan menyelesaikan persoalan ini. Kami di Dapil yang memang sering  
cara langsung membutuhkan solusi yang cepat ya dari  
pemerintah untuk persoalan ini. Walaupun kita memahami di satu sisi di beberapa daerah juga kita  
sudah melihat ada progres yang membaik dari tahun ke tahun seperti yang saya dilihat, saya kawal di  
Kabupaten Rembang *Alhamdulillah* juga mulai dari tahun ke tahun terus ada perbaikan, tetapi tolong  
juga di daerah-daerah yang lain, saya kira juga harus mendapatkan pelayanan yang sama sehingga  
ada kepastian dari masyarakat dari seluruh elemen Negara ini bahwa persoalan K2, persoalan  
kepegawaian ini semakin hari semakin bisa membaik.

Yang kedua soal beberapa kebijakan yang terbaru dari Pak Menteri saya kira patut diapresiasi,  
saya ingin menekankan satu hal terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja, yang selama ini  
memang sudah dilakukan melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini kalau  
berjalan dengan baik saya kira tidak hanya pada tataran formal saja tetapi bagaimana soal etika ya, ini  
juga menjadi satu cakupan, katakanlah program penguatan akuntabilitas ini akan bisa membantu  
mengurangi kalau kita lihat sekarang ini ratusan 320-an kepala daerah yang sudah terlibat kasus  
hukum, ini juga tidak hanya kepala daerah nya saja, tetapi juga keterlibatan aparat-aparat Birokrasi di  
bawahnya saya kira tidak sendirian kepala daerah itu terlibat dalam kasus-kasus hukum terutama di  
korupsi ya 320-an.

Nah saya berharap program kementerian ini juga bisa mendorong, bisa meminimalisir dari tahun  
ketahun jumlah keterlibatan kepala daerah dan juga para aparatur birokrasi di bawahnya terkait  
dengan kasus-kasus korupsi terutama.

Yang ketiga soal penyerapan anggaran saya kira masih cukup wajar lah ya, apalagi juga  
adanya kebijakan penghematan terkait perjalanan dinas dan juga paket meeting konsinyering  
walaupun teman-teman dibawah juga sambat bahasa Jawanya, sambat kepada kami, wah ini sekarang  
sudah harus tirakat, harus tirakat teman-teman tidak hanya para birokrat tetapi juga teman-teman  
anggota DPRD seperti tadi disampaikan Pak Bambang bahwa memang ada nuansa bagaimana  
pengetatan anggaran itu bisa berjalan dengan baik, nah maksud saya kebijakan penghematan itu  
betul-betul harus diikuti oleh tadi ya. Out put dari penguatan akuntabilitas nyambung *gitu*, antara  
keinginan kita untuk memaksimalkan kinerja birokrasi dengan efisiensi yang kebijakan efisiensi ini  
harus nyambung jangan sampai nanti ada satu hal yang tidak nyambung sehingga out putnya di kinerja  
menjadi lemah dan sebagainya, tetapi saya optimis bahwa kebijakan ini adalah yang baik, tentu karena  
larinya nanti juga kita melakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

Lalu yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya tidak tahu apakah Menpan ini  
juga menaungi karena kami anggota baru di sini, menaungi atau melakukan pengawasan, atau  
supervisi terhadap seluruh kegiatan kementerian yang ada *gitu* ya. Soal pelayanan publik, intinya soal  
pelayanan publik, pelayanan birokrasi, saya mendengar ada kebijakan di salah satu kementerian yaitu  
kementerian agama yang melarang guru, guru Pegawai Kementerian Agama, PNS Kementerian Agama  
mengajar di lembaga pendidikan swasta, jadi mereka yang selama ini ditugaskan ke Madrasah Aliyah.  
Madrasah Tsanawiyah atau SMP atau SMA Swasta itu di tarik kembali, tidak ada pelarangan sih, tetapi  
prakteknya ditarik kembali mereka ditarik kembali, lalu ditugaskan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri,  
Madrasah Aliyah Negeri, ke sekolah Negeri dengan diberi jam yang penuh ya, full, sehingga tidak  
memungkinkan dia untuk bisa mengabdikan di lembaga pendidikan yang swasta, ini saya mendapatkan  
laporan di daerah pemilihan kami di Kabupaten Rembang terjadi semacam ini jadi kami mohon juga  
apakah ini tidak justru memberikan satu diskriminasi, terhadap pelayanan dalam hal ini dunia  
pendidikan terhadap masyarakat. Karena negara ini kan belum mampu sepenuhnya untuk mengcover,  
memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga warga secara sukarela  
mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, mendirikan lembaga pendidikan, tanpa diberikan jaminan  
mau dikasih bantuan sekolah, dan bantuan gedung, dan sebagainya, mereka dengan sukarela tetapi  
ketika ada PNS, Guru PNS yang mengajar di situ lalu ditarik kembali, bahkan ada semacam larangan

dari teman-teman pelaku pendidikan, terutama teman-teman juga bisa memperhatikan hal ini.

ORI, memang kalau dalam posisi seperti ini kita tidak bisa mengharapkan kerja yang lebih ya? dari ORI, mesti memang harus ada upaya perubahan, kita lakukan evaluasi secara menyeluruh bagaimana agar ORI ini bisa betul-betul bertaji, karena kita lihat semakin banyak juga sebenarnya yang menjadi tugas dari ORI ini tetapi karena keterbatasan dari regulasi saya kira yah mungkin hanya itu yang bisa kita lihat dari kerja ORI itu.

Saya kira demikian Ketua. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikum sallam,***

Pak Arwani bisa disampaikan langsung ke Pak Lukman Hakin Saifuddin, Bu Diah tadi yang sudah menunggu, silakan setelah itu dari Hanura ya, belum saya kira ya?

**F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos):**

Terima kasih Pimpinan,

Yang saya hormati Menteri PAN, Kepala BKN dan Ombudsman RI, saya pikir sangat menarik sekali mengenai program efisiensi ini tapi satu hal yang perlu di catat di sini menurut saya, efisiensi itu tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah anggaran mengurangi atau menambah jumlah pegawai, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana sebenarnya negara membangun satu strategy managemen sumber daya manusia dalam birokrasi, dalam aparatur negara, menurut saya ini tantangan yang cukup besar bagi pemerintahan sekarang. Sebetulnya bagaimana strateginya, kenapa dilakukan efisiensi dan korelasinya dengan pembangunan kinerja, untuk mengoptimalkan pelayanan publik outputnya.

Lalu yang kedua saya minta tolong dijelaskan juga tentang adanya save bloking anggaran ini Pak, yang sebesar 23 milyar untuk belanja pegawai, tunjangan kinerja, dan sisanya untuk penajaman ke program kegiatan, jadi satu sisi ada efisiensi, tapi satu sisi ada agenda penambahan anggaran atau save bloking, berarti ada kebutuhan anggaran yang bisa belum terpenuhi akibat efisiensi itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya mohon maaf, sayang waktunya ternyata sudah lewat saking asyiknya, kita perpanjang sampai jam berapa ini? jam 12.45, 12.45 ya? mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu, mohon fokus kepada pembahasan anggaran ya? terima kasih.

Ya silakan Pak Tagor.

**F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):**

Terima kasih Pimpinan

**Pak Menteri beserta jajaran yang kami hormati.**

Khusus mengenai K2 sebenarnya inii kecelakaan masa lalu yang harus diperbaiki oleh Pak Menteri, saya katakan kecelakaan tatkala honorer itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh organisasi

terdahulu ada yang ganti bupati Saudaranya dimasukan dan dibutuhkan dari pengalaman saya sebagai bupati pernah saya, itu tamu tidak bisa masuk lagu, ruanganpun tidak cukup dan kerja dia cuma duduk-duduk artinya apa? Pak Menteri ini punya efek domino ke depan ini harus dikaji. Kemudian strategi harus menyelesaikan, K2 ini harus diselesaikan apakah penyelesaian K2 harus jadi Pegawai Negeri itu harus dikaji pak, atau ada cara lain untuk mengatasi ini. Karena kebanyakan ini tidak di, kebanyakan yang saya lihat ini tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan pada organisasi-organisasi yang ada pada pemerintahan, tapi karena saudara dan lain-lain, ada yang cari uang, sogok menyogok dimasukkanlah dia jadi Pegawai Honorer. Perekrutan pegawai honorer juga main sogok ini di di tempat, ini fakta pak, jadi fakta ini harus kita kaji, dan efek dominonya juga harus dikaji, kalau masalah misalnya anggaran sekian itu tidak begitu sulit cukup Pak Menteri mengundang Bupati, DPRK yang ada di daerah itu, karena ini kan dari anggaran DAU kalau mereka juga kepingin, K2 itu diselesaikan, mereka tentu akan memindahkan anggaran lain ke untuk kepentingan pegawai negeri itu, yang dipegawainya itu cuma efek dominonya ini sudah siap tidak kita, karena setelah dia jadi pegawai negeri punya hak-hak yang harus kita penuhi, padahal dia tidak kita butuhkan jadi penyakit ini, tidak selesai Pak menteri. Kemudian K2 sepakat kita harus selesai Pak, selesaikan tapi jangan membuat kecelakaan lain yang lebih besar untuk negeri kita ini.

Kemudian perekrutan Pegawai Negeri yang baru filosofi kebhinekaan tolong dilihat pak, karena misalnya di kampung saya itu, orang itu konflik berkepanjangan sistem perekrutan pegawai negeri sekarang cukup bagus, tapi belum tentu bagus untuk daerah itu. Orang, saudara-saudara kita di tempat lain masuk kesana, pernah di Aceh itu satu daerah tidak membolehkan orang lain masuk, saya tidak, saya tetap karena NKRI itu berhak tapi filosofi kebhinekaan itu akan berkurang ini pak, karena tingkat pendidikannya tidak sama, pernah saya alammii Pak Menteri waktu saya mengadakan TUK Uji Kemampuan di SMA itu ternyata dari 860 sekian siswa itu itu hanya 6 orang yang lulus betul, yang lainnya kucar-kacir akhirnya terpaksa diambil kebijakan, diajari oleh guru biar lulus semua, celakanya guru ini merasa hebat sehingga dia meminta di pangkat pilihan, pangkat pilihan kalau Pak Menteri mau populer pak, kalau mau populer ya? silakan angkat semua, tidak peduli yang baru masuk, yang apa K2 itu angkat, asal K2 angkat kalau mau populer.

Tapi kalau demi menyelamatkan negeri dan negara ini hati-hati, hati hati karena ada efek dominonya, jadi pegawai negeri, jadi bupati, jadi DPRK, jadi pedagang, saya sudah alami semua. Jadi dari pengalaman saya ini pak mungkin Pak Menteri yang terhormat, saya lebih tua, pengalaman saya lebih, jadi yang saya alami pengalaman buruk ini jangan terjadi, jangan sampai efek domino ini ditinggalkan oleh Pak Menteri kepada Menteri yang akan datang jadi dikaji betul-betul, tentu Dewan yang terhormat juga akan setuju. Bahwa negeri ini harus diselamatkan, dan kinerjanya harus bagus. Bukan hanya sembrang K2 pegawai negerikan, malah sekarang Saudara-saudaraku dari Komisi II ini Bupati dan lain-lain masih mengangkat honorer, kalau biasanya honor ini dengan honor satu bukan 750, sekarang 200.000 karena diangkat lagi lebih banyak jadi dibagi 2 ini tanpa memperdulikan edaran Menteri yang seperti-seperti ini Pak Menteri, patut ditindak tegas, patut ditindak tegas. Kami mau lihat contoh bapak menindak orang-orang yang seperti ini karena ini banyak pak, bukan satu kami melihat contoh, Pak Menteri yang muda ini pasti hebat nanti. Karena ini banyak pak bukan satu, kami kasih conih paj Menteri, karena kami melihat Pak Menteri yang muda ini pasti hebat nantinya, tapi kalau ternyata lebih hebat saya yang tua ini, dari pada anak muda ini, ini sudah tidak betul.

Jadi prinsipnya kita selamatkan negeri ini, efek domino yang negatif itu dikurangi. Kemudian carut-marutnya penempatan Kepala Dinas eselon II, Eselon Kepala Dinas dan Eselon II itu pak itu bulan dilantik baru Baperjakat bekerja, untuk melengkapi keinginan Bupati itu, ini dimana-mana sehingga Guru Agama jadi camat, sehingga persoalan yang ada di kecamatan itu dia tidak bisa selesaikan jadi negeri akan hancur, pelayanan akan hancur, kalau penempatan orangnya tidak seperti yang kita inginkan bersama, menurut Undang-Undang yang berlaku. Demikian Pak Menteri. Saya pernah waktu Bupati sok efisien efektif, saya potong semua anggaran yang ada di Dinas-dinas itu apa

jangan sok mengurangi anggaran padahal anggaran itu u.

k mungkin bawa uang dari rumahnya, karena Pegawai Negeri yang ada di daerah, sama dengan kaum dhuafa pak waktu saya hitung, hanya per orang itu kaum kalau dia 3 juta, 100 ribu bagi 5, Rp. 20.000/orang/hari pak, mana untuk listrik, mana untuk tapi orang tetap berebut jadi pegawai negeri ada apa? ini jadi masalah tersendiri, bapak yang kaji nanti. Jadi saya harap Pak Menteri. Ini daerah-daerah yang kami laporkan nanti tidak menempatkan orang pada tempat yang sebenarnya. Menelantarkan orang-orang yang sudah seharusnya, karena hukum di pegawai negeri itu adalah jenjang karir yang terjamin, ini tidak terjadi pak. Yang terjadi adalah siapa yang punya jurus jilat yang bagus, maka itulah yang akan naik ini akan mencelakan negeri ini.

Jadi Bapak Menteri tolong diperhatikan, jangan karena desakan sesuatu Bapak Menteri melakukan toleransi, toleransi yang berlebihan adalah pengkhianatan terhadap negara, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, selanjutnya dari Partai Hanura yang belum sama sekalai, Dr. Frans Agung MUIa Putra kami persilakan.

**F-HANURA (Dr. FRANS AGUNG MULA OUTRA, S.Sos., MH):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Yang saya hormati Pak Menteri Menpan beserta jajaran.**

**Kepala BKN dan Ombudsman dan rekan-rekan Komisi II yang saya cintai, saya banggakan.**

Ini pertanyaan ini saya tujukan kepada BKN yaitu terkait data best kepegawaian, seharusnya itu database itu hanya satu di BKN pak, jadi pemerintah harus memiliki sistim normatif terintegrasi, jangan masing-masing membangun aplikasi jangan membangun aplikasi sendiri-sendiri nah itu pemborosan besar-besaran, dan nantinya jadi ajang korupsi, nah ini sekedar masukan saja kepada Kepala BKN.

Selanjutnya mengenai Ombudsman itu Ombudsman di Lampung itu kurang greget Pak kenapa, ini ada kasus dan ini kasus nyata semenjak Gubernur Lampung dilantik perpindahan pejabat kabupaten kota ke Provinsi Lampung bahkan itu ada Kepala Dinas PU, kepala dinas pengairan, itu golongannya IV/b nah ya sudah sudah Golongan IV/d, IV/c jadi banyak pegawai-pegawai pejabat eselon, ee golongan IV/d yang tidak punya job di propinsi itu. Nah karena mereka membawa pejabat-pejabat dari kabupaten kota. Sehingga terjadi kecemburuan sosial dan psikologis terhadap senior-senior di propinsi Lampung itu.

Jadi harapan kami Ombudsman di Lampung untuk melakukan evaluasi dan mensidak terhadap, kepangkatan dan status pegawai termasuk juga formasi pegawai yang ditetapkan oleh para bupati, walikota dan gubernur dan ini rame Pak Menteri lagi dibahas di kalangan birokrasi yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan ada seorang Kabag Golongannya III/d itu anak buahnya IV/a ada, nah ini mohon menjadi perhatian Pak Menteri, syukur-syukur nanti Pak Menteri bisa hadir ke Lampung karena Pak Menteri kan belum hadir ke Lampung, kebetulan di Komisi II ini ada 4 orang orang Lampung, satu dari Demokrat, satu dari Nasdem, satu dari PDIP, satu dari Hanura jadi Pak Menteri bisa hadir ke Lampung karena Pak Faisal Tamim, Pak Mangindaan, dulu pernah ke Lampung Pak Menteri, karena

ahun 2002, SK saya SK Pak Faisal Tamim, Nah ini sekedar pi. Terima kasih Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Frans, yang efisien waktunya, Pak Tamanuri dari Lampung juga ini, Nah dari PKS akhirnya ada juga ini, Pak Saadudin.

**F-PKS(Dr. H. SA'ADUDDIN, MM)**

Baik,  
*Bismillahirrohmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Tapi Pak Tamanuri dulu Pak Saad karena beliau duluan.

**F-NASDEM (Drs. TAMANURI, MM):**

Terima kasih Pak Pimpinan.  
**Yang saya hormati Pak Menteri, Bapak dari Ombudsman, Bapak dari BKN.**

Saya mengingat falsafah Jawa bahwa Jer Basuki mowo Beo, jadi kalau tidak ada biayanya, kalau tidak ada anggarannya yang pas, tentu lembaga kita ini, instansi kita ini tidak bisa berjalan sebagaimana harapan kita. Oleh karena itu kami di Komisi II tentunya akan mendukung sepanjang betul betul dana itu bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian yang kedua saya sampaikan di sini mohon dapat menjadi catatan untuk yang akan datang apa itu di PP apa dia itu Undang-Undang saya lupa bahwa adanya 2 Baperjakat, Baperjakat adanya di tingkat kabupaten kota, Baperjakat adanya tingkat propinsi. Jadi Baperjakat hasil Baperjakat dari Kabupaten kota ini dibawa ke propinsi kemudian di Baperjakat kan lagi sehingga hal ini akan mengakibatkan ya kewenangan dari pada kepala daerah, bupati, maupun walikota hilang, soalnya yang keluar itu adalah kemauannya Baperjakat Provinsi. Nah oleh karena itu saya rasa untuk masa yang akan datang kita harus perhatikan karena dulu dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 32 hanya 5 urusan yang tidak diserahkan, tapi kita tidak perlu kembali lagi ke situ. Karena tentu kita lihat perkembangan dari pada zamannya, akan tetapi jangan semua, jangan semua kewenangan Kepala Daerah, Kepala Daerah itu, urus-urus sendiri, otonomi itu. Kalau semuanya diambil sama provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pusat ini apa guna lagi, udahlah K2, bentuk ini saja, apa perpanjangan tangan semua saja, tidak usah ada Kepala Daerah, tidak usah ada Bupati, tidak usah ada Walikota, sebab mereka tidak bisa, tambah lagi baru-baru ini semua perizinandilimpahkan kepada gubernur bukan dilimpahkan diangkat ditarik dari Tingkat II, baik dia Kabupaten Kota semua perijinan hanya saja yang ada sekarang, di bupati atau walikota perijinan situ, ijin tempat usaha barang-barang kelontongan yang lain itu diambil semua.

Nah dari mana datangnya PABS sedangkan kalau tidak salah itu dulu tunjangan operasional taktisfonnya bupati itu tergantung banyak sedikitnya PABS nya kalau semuanya sudah diambil sama Gubernur maka tidak ada lagi ini pendapatan itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin hanya sekedar untuk ini saja, kita sama-sama berpikirlah, ini DKI ini luar biasa menaikkan tunjangan-tunjangan Lurah saja 35 juta, Camat sampai 65 juta apakah hal serupa itu tidak menimbulkan kecemburuan seperti orang-orang yang daerahnya berbatasan Bekasi, Cilegon, Serang, apa Tangerang segala macam, memang bagus cuma negara kita kan Negara kesatuan, bukannya kita menonjolkan bahwa kita mampu untuk mengeluarkan dana seperti itu, tidak itu menimbulkan satu kecemburuan dari pada



...a perlu perhatikan yang lain itu hanya dapat 3 juta sebulan, ...a tidak enak. Akhirnya nanti mereka ngadu semua kepada ...nti DKI, kita disini cukup sepersepuluh DKI saja kalau kerjanya karena apa? karena gaji kita tidak sama, nah itu mohonlah dari Pak Menteri mungkin dan yang lain-lain dapat memperhatikan hal ini karena kita adalah satu Negara yang bukan federal kita sama-sama jadi kalau kita menunjuk kemampuan-kemampuan, masih banyak sekarang ini masih banyak yang dibawah kolong jembatan masih banyak yang di pinggi-pinggir kali, kenapa uang yang sebanyak ini, ini gak kita gunakan untuk itu dulu, nanti dulu yang naikan itu.

Saya rasa demikian. Terima kasih

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ini himbuan yang sangat menyentuh dari Pak Tamanuri, saya juga bahkan kemana-mana itu Pak, kesenjangan, termasuk ke DPRD yang lain DPRD-RI juga bahkan he he.

**INTERUPSI:**

Ketua, Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Tadi Pak Saadudin duluan, Pak Saad duluan.

**F-PKS (Dr. H. SA'ADUDDIN, MM)**

Baik,

***Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Sa'aduddin Pak Anggota-104 dari Partai Keadilan Sejahtera.

**Pak Menteri yang saya hormati,  
Pimpinan Komisi dan hadirin yang berbahagia.**

Saya ingin menyampaikan bahwa setelah kami reses pada saat itu berkeliling di satu kampung-kampung lain lagi-lagi ungkapan yang sampaikan para honorer K2 beliau menyatakan bahwasannya Pak, usia kami usia yang sudah sangat memprihatinkan kalau diangkat menjadi PNS, yaitu usia 35 keatas, padahal kami sudah bekerja dan mengabdikan pada negara sekian tahun, oleh sebab itu tolong diperjuangkan Pak kami agar kami bisa mengabdikan negara melalui PNS itu, Nah keluhan ini kami dengar nampaknya kalau hal ini terjadi juga, kami juga sepakat tadi sampaikan oleh teman-teman di komisi untuk mendorong dan mendukung dengan kalau dibutuhkan anggaran bahwasannya K2 adalah prioritas yang harus kita perjuangkan kalau bagaimanapun juga, mereka adalah bagian dari pada kita yang telah mengabdikan, membantu, rakyat kita menjadi cerdas, karena kecerdasan adalah bagian dari pada warga kita yang harus diprioritaskan.

Oleh sebab itu saya meminta kepada Pak Menteri, walaupun yang disampaikan oleh teman saya, bisa jadi ada kata yang diprioritaskan kolega-koleganya, itu juga tidak semuanya ada juga yang demikian, jadi jangan sampai persoalan ada kolega sehingga kita tidak memprioritaskan yang lainnya karena bisa jadi itu adalah bagian yang harus kita perjuangkan juga oleh sebab itu saya juga meminta kepada Pak Menteri, bahwa prioritas anggaran yang berkaitan dengan penerimaan K2 ini, nampaknya

setiap tahun ada yang pensiun, saya ini adalah bagian yang menerima hal demikian dan saya tidak pernah juga gga atau saudara saya untuk menjadi honorer, tidak karena

memang itu prioritas yang saya lakukan untuk kepentingan rakyat kita.

Oleh sebab itu kami sekali lagi meminta bahwa ini suatu yang tidak bisa ditunda karena K2 ini adalah bagian dari rakyat kita yang telah membantu mencerdaskan anak bangsa, yang di sampaikan juga kasus-kasus yang di lapangan yang ada pada rakyat kita ini sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi saya minta kepada Menteri agar K2 ini prioritas. Karena kami di Komisi II untuk membantu anggaran yang akan dipergunakan untuk hal tersebut, terima kasih Pak Menteri.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, singkat-padat lanjut ke Pak Subarna dulu tadi, mohon maaf ini, setelah itu Pak Willy.

#### **F-GERINDRA (H. SUBARNA, SE., M.Si):**

***Bismillahirrahmanirrahi, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Terima kasih Pimpinan,  
Yang saya hormati Menteri Menpan kalau tadi banyak sekali berbicara tentang K2 persoalan negeri ini banyak yang saya usulkan singkat saja ini tentang THL TBPP penyuluh pertanian, yang banyaknya sekarang itu sekarang sudah lebih 20.473 orang, dimana ini dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2007 dan ini telah terjadi juga keputusan menteri yang dilakukan oleh 3 kementerian, ini sebenarnya sudah ada pernyataan pada tahun 2010 ini angka di atas sekitar 10.000 orang nah ini juga mohon maaf ini menjadi catatan tersendiri yang harus dipikirkan oleh Kementerian sekarang saya rasa itu cukup pak, tentang tenaga penyuluh pertanian ini sekitar 20.000 yang harus dipertimbangkan, dicatat tidak hanya K2, K2 tadi sudah banyak sekali yang berbicara tentang penyuluh pertanian, ini tolong Bapak lihat itu karena sekarang ini jelas yang orientasi pertanian nah ini juga harus diperhatikan, Terima kasih,

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih mohon Pak Willy waktunya ya? kita ini sudah memperpanjang terus ini kalau tidak bisa kalau ini yang terakhir saya kira ya?

#### **F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM):**

Ya terima kasih.

**Terima kasih Pak Ketua Bapak Menteri Ketua ORI dan BKN.**

Pertama untuk Pak Menteri tadi telah disampaikan bahwa Menpan ini melaksanakan suatu penghematan yang kurang lebih sampai 33 milyar, kemudian ada tadi catatan bahwa ini jangan di pindah-pindahkan atau tetap saja dialokasikan untuk Menpan antara lain nanti untuk tunjangan kinerja dan sebagainya.

Nah menurut hemat kami kalau memang ini sudah ada rencana untuk penggunaan itu artinta diel saja bahwa artinya penghematan tadi tidak jadi artinya anggaran yang tetap dibutuhkan seperti yang pagu semula, jadi mungkin itu sesuatu yang ada ketegasan untuk anggaran.

kan juga atau di K2 ini apakah juga termasuk menyangkut yang lalu tahun yang lalu itu, masalah Sekdes ini kan pernah seperti ini kemudian macet, atau mandeg, akhirnya ada banyak

Sekdes yang sekarang ini mereka juga menanyakan bagaimana program itu, apakah itu hanya satu kali itu saja pengangkatan sekdes jadi Pegawai Negeri atau sudah tidak ada lagi, dan tentu ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita mengingat dana Desa itu apabila dikelola oleh Sekdes yang latar belakangnya bukan dari pegawai negeri atau mereka yang sudah terlatih di dalam administrasi, ini juga akan menjadi masalah besar kita melihat ada banyak sekali Sekretaris Desa itu yang berurusan dengan hukum, ya karena ketidak tahuan dan ketidakmampuan aparat ini, nah sehingga ini juga harus menjadi perhatian, karena mengingat Sekdes ini adalah ujung tombok pemerintahan kita yang ada di tingkat Desa, nah jadi ini hal yang kami sampaikan.

Kemudian, untuk ORI untuk teman kami ini kami melihat bahwa ada Undang-Undang 25 tentang standarisasi pelayanan public ini menurut hemat kami sesuatu hal yang tadi seperti teman-teman lain kalau memang perlu ada revisi perbaikan agar ORI ini menjadi salah satu kontrol yang bagus untuk pelayanan publik karena kita melihat pelayanan publik di negara kita ini bisa dikatakan masih belum standard, ya kita melihat sekali ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita mengingat lagi bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintahan yang baru ini ada pelayanan satu atap, ya mungkin melalui Badan Penanaman Modal dan disana tentu menjadi sarang yang tidak bisa kita pungkiri, sesuatu yang harus dipersiapkan ya untuk memonitor kelemahan-kelemahan kapan perlu pasang CCTV di sana sehingga segala sesuatu yang ada di sana itu mampu terekam untuk perbaikan investasi yang ada di Republik ini. Nah oleh karena itu tentulah anggaran untuk ORI ini ya mengingat ada sesuatu yang kita berharap kalau selama ini semua institusi, kementerian melakukan reformasi perbaikan-perbaikanlah tentu menurut hemat kami yang paling standar itu kalau ada satu institusi yang mengontrol kesana tentu akan lebih baik, sehingga standart minimum atau yang bisa kita katakan, standar publik yang memenuhi syarat tentu juga harus mendapat kontrol dari lembaga lainnya, nah mungkin ini masukkan.

Terakhir untuk Badan Kepegawaian tadi juga disampaikan bahwa masalah pensiun yang memang sedikit rumit ya ada orang yang sudah pensiun tapi dia harus mengembalikan uang karena menerima, terus masuk ke reningnya karena belum distop untuk pensiun itu juga sering terjadi, pengalaman kami selama kami juga di pemerintahan maksudnya waktu pernah menjadi bupati tetapi juga yang paling penting menurut kami ya, adalah bagaimana agar menyangkut masalah administrasi kepegawaian itu harus efisien itu yang diharapkan, mengingat para pensiunan-pensiunan ingin sekali agar mereka diberikan pelayanan yang baik mengingat mereka akan purna akan purna tugas, sehingga ini juga menjadi bagian yang menjadi perhatian dari BAKN ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

### ***Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Nama kami Willy M. Yoseph A-220 Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kalimantan Tengah.

### **KETUA RAPAT:**

Calon Gubernur, begitu pak ya, baik Pak Dari PPP, Dr. Haji M.Z. Amirul Tamim, M.Si

### **F-PPP (Dr. H. M.Z. AMIRUL TAMIM, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri yang kami hormati, Ombudsman dan Kepala BKN serta seluruh jajaran dan teman-teman sekalian.

erikan apresiasi kepada Pak Menteri dan BKN, Ombudsman yang dituangkan tercermin dalam anggaran yang tadi sudah mana yang mungkin perlu menjadi catatan kita saat ini ekonomi di daerah itu melemah, ya melemah agak sepi beberapa komponen-komponen masyarakat ini mengeluh, ini apa ada kaitannya dengan BBM atau penghematan belanja di Aparatur Negara ya? atau ada kebijakan batas bawah tiket dan lain sebagainya, karena kalau kita lihat bahwa kita sepakat komisi II perlu mendukung mitra kerja dalam bagaimana penganggarannya tahun 2015 ini saya kita kita tidak bisa terlalu banyak, karena ini dalam konteks APBN-P tetapi ini bisa menjadi catatan dan masukan-masukan fenomena ini perlu kita baca. Di sisi lain pajak ini digenjut baik itu aparatur masyarakat biasa mereka adalah wajib Pajak, tentu dengan genjotan pajak ini pasti pengeluaran bertambah. Di satu sisi ini aparatur pendapatannya ini pasti berkurang karena mungkin honor, perjalanan dan lain sebagainya, serta untuk kita menentukan gaji mungkin ini akan berdampak kalau kita naikkan gaji, pasti berdampak besar, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk yang akan datang.

Oleh sebab itu tahun ini perlu kajian yang benar jangan sampai kita hanya terjebak dengan konsep penghematan di satu sisi itu tidak salah tetapi ada tujuan kita yang besar mensejahterakan bangsa tentu ekonominya harus menjadi fokus, kalau fenomena sepi nya ekonomi masyarakat di daerah ini ini harus menjadi kehati-hatian kita, karena kembalinya pasti tudingan kepada aparatur, kalau kembali kepada aparatur ini bukan penghematan lagi, kalau tudingan atau sebentar yang dibakar kantor, yang didemo ini dan lain sebagainya, kita hemat di satu sisi tapi kita mahal membayar daripada efek-efek domino lainnya.

Oleh sebab itu saya kira kita perlu mendukung utamanya Ombudsman agar Ombudsman tahun 2015 ini bisa melihat sejauh mana pelayanan public ini dan bagaimana efek domino yang lain dan ini harus menjadi masukan-masukan untuk kita, nanti menyusul tahun 2016, saya kira ini untuk menjadi catatan-catatan penting menjadi perhatian, karena Pak Menteri tidak sedikit kita dapat teman-teman "eh kenapa" ini ada masalah lain kalian tidak ke sini sini" *gimana* pak lumsom kami cuma sekian ya? ini masih ada cicilannya ini yang belum kita terselesaikan, kemudian ada batas bawah, tiketnya sudah naik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sehingga kinerja aparatur ini tidak akan optimal saya kira demikian.

Terima kasih.

***Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ya Terima kasih. Pak Zul sudah senyum-senyum sama saya ini, lewat terus katanya.

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Terima kasih, ngalah sedikit pimpinan, ini mau nambah Koreksi.

**KETUA RAPAT:**

Ini saya mau lanjutkan ketok palu untuk sampai jam 1 ini karena tadi sampai jam 12.45, saya lanjutkan dulu ya? kita sampai jam satu.

**(RAPAT : SETUJU)**

Pak Zul Mohon, Terakhir ya?

koreksi mencari keadilan, kita itu dengan begitu jumlah yang memperdalam bertanya itu kita jelas-jelas saja waktunya Pimpinan semenit, 2 menit, 3 menit. Ini Pimpinan kalau saya ingin mulai ngomong, semenit katanya yang lain tidak, kalau gue ini kriminalisasi ini itu saja Pimpinan, kalau yang lain saya perhatikan, Pak Yudi berarti saksi birokrasi pak, reformasi yang lain 5 menit diam, kalau Pak Zul, Pak Zul 1 menit. Jadi hilang konsentrasi saya, ya sudahlah memang nasib saya pimpinan,  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ampun, ampun Pak Zul, Baik terima kasih Pak Zul. Mengingatkan dari Pimpinan ada sedikit yang ingin disampaikan sedikit sebelum Pak Menteri dan Kepala ORI dan BKN nanti menyampaikan jawabannya.

#### **WAKIL KETUA (Ir. H. A. RIZA PATRIA, MBA/F-GERINDRA):**

Oke Terima kasih Pak Menteri, saya langsung saja, saya kira sama yah, kami di pimpinan hampir setiap hari didatangi dan surat menumpuk yah? soal K2 kami memahami reformasi dan berbagai strategi yang dijalankan oleh Kemenpan, namun memang ini sesuatu yang sulit tapi memang harus kita putuskan mencari kebijakan yang baik.

saya langsung saja ini kami didatangi banyak di antaranya dari K2 di kota Bekasi ya jadi yang ikut yang akan ikut tes itu 4.200 yang dapat ikut, yang dapat yang disortir terus dapat Nomor 3.132 yang lulus 838, lulus ikut tes dari pusat diluluskan lah kira-kira begitu tapi walikotanya dengan bangga memotong setengah, jadi sudah lulus dipotong setengah seolah-olah efisiensi dan lain-lain jadi bangga dia mengurangi, sementara di Kabupaten lainnya apakah di Bogor, Kerawang, Bekasi yang lainnya yang lulus 1.200 ya seluruhnya diusulkan dari 800 yang setengah dapat NIP yang setengah tidak dapat NIP jadi ada kebijakan yang salah menurut saya, sementara yang lulus ini hampir 90 persen lebih adalah guru, jadi bukan bukan honorer-honorer tambahan lah kira-kira begitu, sementara setahu kami memang guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas sebagai contoh di SMP nya ada 56.000 lebih siswanya, gurunya cuma 1.000, SMA nya 21.075 gurunya cuma 711, begitu juga SMK jadi tidakimbang, muridnya 946, gurunya cuma 103 yang PNS.

Jadi mohon kebijaksanaan dari Pak menteri memang tadi betul beberapa kepala daerah itu ya dengan cara dan gayanya sendiri mungkin maksudnya baik, tapi implementasinya yang salah saya kira, harus ada keadilan sementara orang menunggu tidak hanya satu, dua tahun, tapi bertahun-tahun dan sudah di verval, verval itu apa, verifikasi dan validasi ini ada rekaman CD nya semua, jadi kalau ketemu selalu manis itu baik iya oke dan sebagainya, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan mohon kebijaksanaan saya kira mungkin beberapa yang menjadi prioritas, terima kasih Pak Menteri itu saja, memang berat mengurus seluruh Indonesia tapi mohon perhatian, jadi ini lulus di pusat Pak bukan internal. Terima kasih mohon bantuan dukungan.

Terima kasih. Karena dari partai sebelumnya Pak Yudi, mungkin nurut kalau sama Pak Yudi.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pimpinan, lalu kita lanjut saja kepada jawaban, saya kira jawaban yang utama memang kaitannya dengan anggaran, karena memang bab kita anggaran, meskipun melambung ke mana-mana ujungnya ini masalahnya adalah di anggaran supaya bisa ditindaklanjuti segera dalam kesimpulan, terima kasih Pak Menteri, silakan.



pimpinan, dan seluruh anggota komisi II yang kami hormati, merespon beberapa yang sudah disampaikan secara umum dan ada beberapa hal yang secara khusus yang terkait dengan masalah anggaran, memang anggaran kementerian kami tidak tidak besar, karena kementerian kami berada pada nomenklatur yang ketiga, yaitu kementerian yang membuat atau mengeluarkan kebijakan kebijakan, bukan Kementerian yang teknis yang memiliki program-program anggaran pembangunan yang terimplementasikan secara langsung, kalau kami melakukan efisiensi semata-mata memang ada target pemotongan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan konsinyering, sebagai konsekuensi kebijakan pengetatan anggaran dan efisiensi.

Namun, kami juga sudah mencanangkan parameter basis penilaian kinerja, saat ini tidak semata mata didasarkan oleh besarnya serapan anggaran, tetapi seberapa besar instansi pemerintah mampu melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi kinerja dan target-target pencapaian hasil, sehingga tidak perlu di khawatirkan kalau kami melakukan efisiensi terus kinerjanya menurun, tidak jadi semangat yang kita naikkan, karena seperti tentara gajinya kecil tetapi dia sanggup upacara pagi, siang, sore, jadi kita akan pompa, inilah salah satu tantangan dari komitmen pemerintahan dibawah kepemimpinan Pak Jokowi dan JK ini untuk melakukan revolusi mental, jadi kita ingin mencoba semaksimal mungkin merubah mindset dari aparatur sipil negaranya, lalu kemudian mendisiplinkan lagi prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang good and clean governace salah satu nya adalah efisiensi terhadap anggaran.

Jadi ibu jangan khawatir Insya Allah walaupun kami mengetatkan anggaran tapi Insya Allah kinerja kami tidak menurun, yang terkait dengan masalah-masalah K2 saya mencatat dengan seksama seluruh usulan-usulan dan masukannya, pada prinsipnya bahwa kami mengikuti rekomendasi dari komisi II ini bahwa seluruh persoalan mengenai K2 ini kita selesaikan selambat lambatnya akhir Desember tahun 2015, bukan berarti diselesaikan itu nanti, tidak tapi paling lambat artinya ada progres progres dan road meet penyelesaian yang akan kita susun bersama, oleh karenanya pada awal rapat kerja tadi kami meminta ada jadwal yang khususnya dimana mungkin nanti dari masing-masing Poksi ada wakilnya beserta Pimpinan, dari kami juga untuk membuat road meet dan juga kriteria-kriteria tentang proses seleksi administratif yang lebih forensik artinya yang lebih, yang lebih memastikan bahwa hanya mereka-mereka yang berhak saja kemudian diikutkan pada proses selanjutnya untuk penyelesaian masalah program honorer K2 ini. Jadi kita akan selesaikan ini dengan sebaik baiknya sebijaaksana mungkin dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan berdasarkan atas aturan aturan yang ada. Kita bersama-sama jadi artinya pemerintah sendiri tidak akan secara sepihak memutuskan K2 ini, kami meminta keterlibatan DPR khususnya komisi II untuk bersama sama.

Terkait dengan anggaran K2 kami juga mengucapkan terima kasih dukungan anggaran secara keluruhan, tadi Pak Saan Mustofa juga kalau anggaran Kementerian sementara ini untuk tahun 2015 kami merasa sudah cukup, penguatan-penguatan program reformasi birokrasi mungkin kita akan canangkan kembali untuk tahun anggaran selanjutnya, nah sisa anggaran penghematan yang sekitar 35 milyar lebih kurangnya tadi kenapa, kami mintakan supaya tetap berada di kementerian kami agar pada saat keperluan untuk tunjangan kinerjanya tidak memerlukan anggaran yang baru, tidak terlalu sulit nantinya, jadi kalau sudah dicadangkan di situ setiap akhir tahun ada tunjangan kinerja institusional yang harus dibagikan tidak melakukan proses yang berkepanjangan kembali, sementara untuk penguatan rekubusing itu sebenarnya untuk penajaman program-program pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjamin target-target kinerjanya berhasil dan ini bukan berarti apa seolah-olah memindahkan saja tidak, tapi nomenklatur memang tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain berada di pos yang itu saja, jadi nanti Komisi II sendiri kan bisa mengawasi dalam proses implementasinya itupun kalau disetujui, kalau tidak kami dengan anggaran yang ada kita Insya Allah akan tetap bekerja dengan baik-baiknya.

Mengenai anggaran untuk program K2 ini memang tidak secara khusus ada di Kementerian Menpan, namun kebijakan secara strategi satu kebijakan politiknya bisa kita ambil bersama sama



sa kita mintakan nanti dari perwakilan Banggar komisi II di dengan Kementerian Keuangan karena anggarannya berada itu misalnya kita sudah memiliki data sebut saja nanti dari 450.000 itu yang akan kita patok kuotanya dari proses seleksi administratif itu di tingkat berapa persen, apakah 50 persen, atautkah 60 persen, lalu kalau kita anggarkan tahun ini artinya nanti akan bisa kelihatan di masing-masing Kementerian K2nya itu berapa, perkiraannya kalau 50 persen kan gampang diambil rata-ratanya kalau kita ambil total 100 persen misalannya X rupiah berarti 50 persen bisa kelihatan, tinggal masing-masing penyebaran K2 di setiap instansi kan berbeda beda.

Nah anggaran secara umumnya nanti diplot oleh Kementrian Keuangan kalau Pegawai Negeri Sipil ini kan bisa dikira-kira gaji terendahnya begitu dia masukkan kan kurang lebih 1,8 ditambah tunjangan kinerja, institusi dan sebagainya kurang lebih ya kira-kira 2,5 sampai 3 juta total, take homepaynya jadi kalikan berapa banyak nah itulah yang oleh Kementerian Keuangan nanti untuk disebarakan di masing-masing instansi, dan usulannya bisa disampakkan secara bersama-sama sebagai komitmen politis kita menyelesaikan K2 ini.

Lalu kemudian terhadap hal-hal yang sifatnya khusus seperti masalah pengangkatan jabatan yang tidak melalui prosedur, lalu kemudian masalah-masalah kepegawaian pada masing-masing daerah konstituen bapak dan ibu sekalian yang terhormat dengan segala hormat kami meminta kalau ada laporan tertulis bisa diberikan kepada kami, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Administrasi Pemerintahan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Aparatur Sipil Negara dapat mendelegasikannya kewenangannya kepada kementrian yang menjalankan tugas aparatur negara berupa kordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan kebijakan-kebijakan kepegawaian. Serta membuat peraturan-peraturan terkait dengan masalah kepegawaian sekaligus juga melakukan supervisi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Oleh karenanya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di daerah pemilihan masing-masing terkait dengan masalah promosi jabatan, mutasi, hal-hal yang terkait dengan masalah kepegawaian, dengan segala hormat kami meminta katakanlah data tertulisnya dan kami memiliki divisi pengawasan serta reformasi birokrasi yang akan segera menindak lanjuti laporan dari bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

Terkait seperti misalnya masalah yang khusus tadi yang di Rembang masalah Menteri Agama tadi pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil ini terikat dengan peraturan tentang PNS, ada juga peraturan pemerintah tentang jam kerja sebesar 37,5 jam perminggu sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara satu hari nya kurang lebih 7,5 sampai 8 jam bekerja. Jadi pada jam itu tidak memiliki, tidak di ijinan untuk bekerja di tempat lain, peraturannya demikian.

Kalau misalnya mereka yang selama ini menjadi guru bantu di swasta dan sebagainya dengan peraturan disiplin ini memang mereka harus memenuhi dulu unsur kewajiban waktu bekerjanya di instansi pemerintah, kalau ada sisa memang tidak ada larangan, tidak ada larangan kalau masih tersisa waktu, tapi kewajibannya adalah bekerja di kantor-kantor atau instansi pendidikan pemerintah.

Mengenai sistem informasi kepegawaian terima kasih Pak Zul nanti, akan kami tindaklanjuti bersama BKN, sekedar informasi saja kalau sistem yang sekarang itu begitu dia mendekati waktu pensiun memang sudah secara otomatis, hal yang bersifat administratif terkoreksi dengan computer dan dia akan diberitahukan bahwa dia sudah selesai dengan administrasinya berjalan.

Contohnya Pak Eko Kepala BKN yang memasuki pensiun pada tanggal 1 Februari seminggu sebelumnya seluruh administrasi sudah computerize tapi mungkin di beberapa tempat belum terkoreksi sehingga itu menjadi PR kami bersama BKN nanti, bahwa sistim informasi kepegawaian akan kami perbaiki dengan sistem online yang tadi Bapak sampaikan supaya tidak foto kopi bulak balik, naik pangkat foto kopi, mutasi foto kopi, mau pensiun pun foto kopi Insya Allah Pak dalam waktu yang tidak terlama ini tidak terjadi lagi.

Mengenai pensiun bupati nanti kami cek Pak peraturannya Pak, supaya lebih sejahtera, oleh karenanya karena pensiun bupati kecil banyak sekali bupati yang menjadi anggota DPR di komisi II.

akan akan dalam lagi Pak mengenai peraturan perUndang-  
angan Kemenpan ini akan kami tertibkan proses pengambilan  
ipaten kota dan provinsi.

Mengenai gaji di DKI mohon izin, setelah selesai rapat ini kami akan bertemu dengan gubernur dan BKD DKI kami akan clearkan masalah ini supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial antar-daerah.

Mengenai penyuluh pertanian ini akan kordinasi dengan Kementerian Pertanian Pak mengenai statusnya yang 10.000 ini tapi proses terprosesnya mungkin akan sama dengan kalau mereka berada pada jalur K-2 nanti, kurang lebih sama kebijakannya kalau mereka pada jalur dari CPNS ini juga menjadi salah satu program unggulan pembangunan nasional Bapak Presiden di bidang pertanian, kami akan perhatikan yang 10.000 ini melalui kordinasi dengan Kementerian Pertanian.

Mengenai Sekdes kalau di dalam ketentuan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Sekdes ini diprioritaskan untuk PNS jadi bukan Sekdes otomatis menjadi PNS di Undang-Undang nya begitu Pak, mengenai Bekasi juga kami minta nanti data-datanya akan kami telusuri, pada prinsipnya mereka yang sudah dinyatakan lulus oleh Panselnas ini tidak bisa didiskon lagi, kalau 800 memang harus 800 sehingga kami nanti akan dalam.

Mengenai tadi komisi II akan melapor konsinyering di Millenium sejauh penyelenggaranya bukan dari instansi pemerintah karena DPR ini kan lembaga, salah satu pemegang kekuasaan legislatif, artinya kalau kami diundang kemanapun Bapak mengundang kami akan hadir, jadi jangankan di Milenium Pak, diundang ke masjidpun kami hadir, jadi pada prinsipnya itu, yang namun kalau kami yang mengadakan kegiatan ya tentu kami tidak mengadakan kegiatan di tempat-tempat yang kami mengeluarkan peraturan tersebut.

Tapi kalau DPR saya rasa dengan berbagai pertimbangan kami bisa memahami dan menghargai. Saya rasa itu, mengenai Kuburaya akan kami cek, kalau ada hal-hal yang mungkin belum sempat saya respon dan masih dirasakan perlu kami dengan senang hati menerima catatan-catatan tertulis maupun kesimpulan lainnya, dan kami juga silakan diakses kapan saja oleh anggota yang terhormat komisi II ini barangkali ada hal-hal yang diperlukan menyangkut tindaklanjut kebijakan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya.

***Wassalammualaikum Warohmatullohi Wabbarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikum Sallam.***

Terima kasih Pak Menteri Nah dari Kepala BKN silakan.

**KEPALA BKN:**

Terima kasih bapak Pimpinan Sidang, tadi sudah di sampaikan secara komprehensif oleh Bapak Menteri, cuma ada sedikit yang mungkin kami perlu tambahkan mengenai sistim aplikasi pelayanan kepegawaian yang ada di BKN. Jadi sejak 2008 itu sistim itu sudah dibangun dan 2011 sudah, sudah berjalan secara online jadi ini sudah terhubung ke seluruh BKD di Indonesia dengan tapi memang kami menyadari bahwa masih ada badan Kepegawaian Daerah yang belum memiliki prasarana yang memadai untuk melakukan pelayanan secara elektronik, jadi kami mencoba untuk terus memberikan fasilitasi pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi BKD untuk melakukan layanan secara elektronik, tapi sistimnya sendiri sudah ada.

Kemudian untuk pensiun ini sudah dilakukan secara elektronik juga dan sekarang ini dengan Keppres 53 tahun 2014 itu penandatanganan SK pensiun IV/c keatas dan kenaikan pangkat IV/c,

delegasikan keBKN jadi tidak di Presiden lagi, ini adalah untuk pensiun dan pangkat, sehingga ini sudah dilakukan secara arkan dan untuk pensiun ini kami juga mengambil langkah-langkah proaktif, kalau tadinya SK pensiun itu harus diambil di Jakarta, kami sekarang mencoba mengirimkan langsung ada yang diantarkan langsung kalau memang daerah dekat oleh Kepala Kantor Regional, tapi yang jauh jangkauannya dari Kantor Regional kami mengirimkan dengan Pos tercatat nah untuk itu maka kami juga membutuhkan anggaran tambahan untuk pos tercatat itu, jadi demikian yang kami tambahkan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Kepala BKN. Pak Danang silakan.

#### **KETUA OMBUDSMAN RI (DANANG GIRINDRAWARDANA):**

Terima kasih Bapak Pimpinan, saya kira pertanyaan saran kepada Ombudsman relatif sangat sedikit, hari ini kita banyak sekali membahas tentang honorer K2 tetapi pada dasarnya bapak Ibu sekalian yang kami hormati luberan terkait pemasangan K2 itu memang juga ditampung oleh Ombudsman tapi memang Ombudsman sampai sekarang belum bisa menindaklanjuti secara taktis dan praktis karena kebijakan nasional terkait dengan itu kami masih menunggu kordinasi dengan Pak Menteri dan memang banyak sekali dari masing-masing daerah itu mengadakan melalui Ombudsman. Tapi bapak ibu sekalian iijinkan kami menyampaikan satu hal yang terkait dengan rencana Ombudsman di dalam jangka pendek ini jadi dalam satu, dua minggu ke depan Bapak Pimpinan Ombudsman akan me louching sebuah sistim informasi apa kepatuhan, implementasi Undang-Undang 25 yang nantinya akan menjadi salah satu bagian penting dari cara kita yang bisa diakses oleh publik termasuk juga bapak-bapak ibu Pimpinan komisi II dan anggota komisi II, kalau kunjungan ke daerah bapak bisa mengecek sebuah instansi pelayanan publik sudah masuk dengan standar Undang-Undang 25 atau masuk dengan Peraturan Menpan tentang Standar Pelayan Publik atau tidak, bapak cukup bisa menggunakan handphone nya masing-masing dalam waktu dekat kita akan louching itu Sabtu, Minggu ini kita dalam masa uji coba minggu depan kami akan bersama dengan barangkali Pak Menteri nanti pas senggang waktunya bersama Pak Menteri kita louch itu dan Bapak Ibu Pimpinan sudah bisa menggunakan aplikasi mobbillephon untuk mengukur apakah instansi pelayanan publik yang Bapak kunjungi sesuai dengan standar pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang 25, sesuai dengan Peraturan Menpan terkait dengan pelayanan publik atau tidak, nanti kita akan louch pada satu, dua minggu kedepan itu menjadi salah satu poin penting sehingga kita bisa mengharapkan kualitas pelayanan publik di Republik ini bisa secara cepat meningkat *gitu* jadi partisipasi yang akan lebih kita kejar.

Saya kira itu bapak Menteri dan Bapak Pimpinan izin satu hal lagi, terkait dengan program-program semacam itulah Ombudsman perlu sekali lagi kami perlu menegaskan sekali lagi perlunya dukungan, suport, fasilitasi, restu, dari bapak ibu Pimpinan di komisi II untuk meningkatkan APBNP ORI, salah satunya dengan itu, dan terkait dengan software yang barusan kami sampaikan sehingga bapak Ibu pimpinan, dan semua pimpinan daerah, semua rekan-rekan pers, bisa menggunakan software itu. Biaya kami keluarkan hanya 20 juta pak, sangat simple, sederhana sekali kami ikuti proses proses penyederhanaan Pak Menteri, hanya twenty milion speries mood, dan itu nanti waktu seketika semua orang bisa berpartisipasi mengukur kualitas pelayanan publik di Republik kita ini.

Saya kira demikian Bapak, terima kasih atas kesempatannya.

kat dan di kita tunggu louchingnya, mudah-mudahan kita bisa ini, dan juga maintenance nya juga penting itu nanti di pikirkan. Baik kita langsung kepada kesimpulan, oh ya Bu Ammy tadi mengusulkan juga merevisi Undang-undang ya? ya boleh juga dipikirkan nanti, apakah dari ORI yang mem-propose atau Bu Ammy juga bisa itu membuat Proposal atas nama anggota secara pribadi, kalau didukung komisi II juga bisa juga kita dukung semuanya, nanti siapa duluan saja, ini pencerahan yang bagus dari bu Ammy, sudah bisa tayang? saya sudah mulai khawatir lagi, habis itu tiba-tiba ada kerusakan lagi, ada istimewa pada hari ini terima kasihnya ini ada data-data juga, ini partai Golkar ini tidak ada yang bertanya satupun, ini luar biasa ya bersama PKB, tapi PKB ada yang hadir juga disini Pimpinan baik, ya.

Yang pertama komisi II DPR RI dapat menerima aporan realisasi pelaksanaan APBN tahun 2014 dengan tingkat penyerapan masing-masing adalah Kementerian PAN RB tingkat penyerapannya sebesar 80 %, BKN tingkat menyerapan sebesar 91,92 persen, ORI tingkat penyerapan sebesar 94,17 persen, bisa disetujui ya ini, informatif sifatnya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Yang kedua terhadap anggaranKementrian PAN RB, BKN dan ORI pada RAPBN Perubahan 2015 Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang mendatang dan komisi II DPR RI juga meminta agar dilakukan kordinasi antar Kementerian - LPNK agar terjadi keterpaduan program atau tidak tumpang tindihnya anggaran setuju ya? saya kira ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terhadap usulan tambahan anggaran BKN sebesar Rp.11.400.000.000,- ORI sebesar Rp.185.793.487.600,- Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahas lebih lanjut dalam RDP yang akan datang. Setuju pak ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang keempat nih yang penting menjadi isu yang besar pada hari ini komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN RB dan BKN untuk lebih mengoptimalkan pengalokasian anggaran tahun 2015 bagi penanganan permasalahan tenaga honorer K2 yang ditargetkan diselesaikan secara komprehensif secepatnya pada tahun 2015 ini

Komisi II DPR RI juga menugaskan kepada Banggar.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):**

Pimpinan itu secepatnya atau paling lambat 2015

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah Pak Menteri pakai istilah paling lambat ya kalau tidak salah, ya, ya, paling lambat ya? tadi Pak Menteri juga memakai istilah paling lambat ya, Desember 2015 tapi bukan berarti bulan Desember bisa juga sebelumnya secara bertahap, jadi paling lambat pada tahun 2015, pakai kata-kata Pak Menteri ya? komprehensif, paling lambat pada Desember tahun 2015

**KADRIE, SH., MH):**

**KETUA RAPAT:**

Ini kan paling lambat, kalau paling lambat bisa lebih awal bahkan sebelum bulan Desember.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):**

Pimpinan mungkin, perlu juga dimasukkan tadi yang berkaitan dengan Kuburaya dan Selayar tadi.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira tadi banyak aspirasi yang masuk juga.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):**

Supaya menjadi perhatian, tidak hanya habis di ruang ini karena persoalan ini 5 tahun tidak selesai-selesai.

**KETUA RAPAT:**

Pak menteri tadi berkomitmen membuka ruang khusus kepada khususnya anggota DPR komisi II untuk menyampaikan secara tertulis karena itu memang harus ada

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):**

Ya supaya ada penegasan, kalau dari Menpan tidak bisa proses itu, itu sudah keputusan Mahkamah Agung. buat saja itu supaya disampaikan kesana, terima kasih.

Ya terima kasih atas catatan itu jadi nanti saya kira Pak Menteri harus menugaskan kontak person, kepada siapa kita bisa menyerahkan bahan-bahan itu.

**F-GERINDRA (H. SUBARNA, SE, M.Si):**

Pimpinan-pimpinan tentang penyuluh pertanian itu menjadi catatan juga ini. Karena itu 20.000 lebih, nasional itu pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya nanti ini, justru Pak Subarna ini nanti yang akan memperjuangkannya sebagai Banggar komisi II,

**F-GERINDRA (H. SUBARNA, SE, M.Si):**

Tapi masukan kesini, masukan-masukan



...k itu kita akan membuat simulasi sampai detail kualifikasi dari apa namanya PNS yang akan di terima seperti apa, di sana di kita nanti bikin simulasi sampai angkanya Pak, mudah-mudahan Pak Subarna nanti di badan anggaran juga Pak Sirmadji juga bisa memperjuangkannya supaya ini nyantol kata kata Pak Menteri, karena nyantolnya di menteri-menteri terkait ya? kalau tidak nyantol ya kita di komisi II sudah berjuang lalu kemudian di Banggar besar terkena angin ribut ini ke mana-mana kan. Oleh karena itu saya kira.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM):**

Pimpinan, Pimpinan,

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Willy

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM):**

Sebenarnya sama pimpinan, jadi kalau dia tercantum di dalam hasil kesimpulan rapat, berarti otomatis nanti kan dia terbawa-bawa terus umpamanya tadi untuk penyuluh pertanian, untuk sekretaris Desa, dan lain-lain sehingga masukan saja, ada ini nya yah mungkin seperti itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya kalau begitu coba kita simulasikan di sini di teksnya.

**F-GERINDRA (H. SUBARNA, SE., M.Si):**

Penyelesaian maaf pimpinan,

**KETUA RAPAT:**

Sebentar kira selesaikan dulu tadi kan paling lambat pada Desember 2015. Itu kita terima dulu ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya komisi II DPR RI juga menugaskan kepada Banggar DPR RI untuk memperjuangkan pengalokasian anggaran terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2 tersebut.

**F-GERINDRA (H. SUBARNA, SE., M.Si):**

Titik dulu, koma.

**KETUA RAPAT:**

Ya komanya di mana Pak Subarna silakan.

... permasalahan tenaga honorer K2, kan begitu THL, TBPP, itu menjadi catatan saja supaya nanti di diperkirakan, diperhitungkan bisa tidak kira-kira, Tenaga Harian lepas, tenaga penyuluh pertanian. Bisa tidak masukan saja, pakai koma saja

**F-PDIP (Drs. SIRMADJI, M.Pd):**

Kayaknya belum mungkin dicantumkan karena masih harus koordinasi dengan Menteri Pertanian masalahnya.

**KETUA RAPAT :**

Ya itulah maknanya, menjadi catatan yang tidak terpisahkan dalam rapat ini tetapi memang biasanya kita tidak langsung kepada nomenklatur ya? yang penting kita sudah menjadi kesepakatan bersama di sini kita arahkan di sana karena nanti akan banyak lagi yang masuk itu kan ada beberapa ketentuan ya sekretaris desa, itu kan semuanya nanti jadi panjang sekali kesimpulan kita ini kalau disebutkan tapi yakinlah, Pak Subarna bahwa itu akan dibahas dalam rapat konsinyering kita ini. Sayakira begitu ya Pak Menteri ya? Pak Menteri juga sudah mendengar nanti bahkan Pak Subarna sendiri yang akan menyuarakannya kembali di di Badan Anggaran jadi itu, justru kita sekarang ini sangat mengandalkan Pak Subarna, Pak Sirmadji ya untuk menyebutkan detailnya kita nanti komisi II di Sub konsinyering menyepakati, bagaimana simulasinya dan disuarakan oleh Bapak-bapak Badan Anggaran Komisi II DPR RI di badan anggaran besar, jadi saya kira kalau ini disetujui, sudah selesai ya?

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):**

Pimpinan, Pimpinan, interupsi sedikit Pimpinan,

**KETUA RAPAT :**

Oh ya sedikit

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):**

Tadi ada dari Pak Menteri bahwa dalam rangka penyelesaian masalah K2 itu akan dilakukan pembahasan secara tertutup begitu antara Timnya Pak Menteri dengan Komisi II.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana, bagaimana Pak? sebentar pak? *gimana* Pak.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):**

Tadi Pak menteri mengatakan bahwa dalam rangka penyelesaian masalah honorer Komisi II DPR RI, Tim Pak Menteri akan dibahas secara tertutup antara Timnya Kemenpan dengan dari komisi II saya kira itu perlu masuk di kesimpulan Pak

sudah pernah memutuskan di rapat sebelumnya secara normatif nah sekarang kita menyepakati mekanisme pembahasannya untuk kemudian menjadi anggaran begitu.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):**

Sebelum anggaran Pak kan mau disisir dulu ini siapa-siapa yang berhak kan tidak semua usulan K2 itu seperti dikatakan oleh Bang Tagor tadi akan diangkat.

**KETUA RAPAT:**

Betul.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):**

Kita jangan mendorong negara ini menjadi negara pegawai, hanya yang berhak saja *gitu*.

Yang kedua bahwa setelah nanti K2 ini dianggap tuntas harus ada penegasan dari Pak Menteri kepada semua KL, kepada semua Pemda, sudah haram hukumnya mengangkat tenaga honorer, jadi kalau ada tenaga honorer itu harus ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Itu harus kita tegakkan Pak, supaya jangan lagi terulang seperti ini. Ini kan kejadian seperti ini, karena kita yang memulai kita juga yang harus mengakhiri dulu, kita lagi yang mengakhiri, sudah ada PP 48 melarang mengangkat tenaga honorer, Pasal 8 sudah tegas mengatakan tidak boleh mengangkat, tapi karena dorongan dari gedung ini, dari ruangan ini kepada Kemenpan, maka itu kemudian dilanggar. Jadi saya minta itu tidak boleh lagi terulang. Makanya perlu ditegaskan di sini juga, di masukan itu bahwa setelah K2 selesai maka tidak boleh lagi dengan dalih dan rupa apapun juga KL dan Pemda mengangkat tenaga honorer. Perlu masuk kesimpulan juga itu. Sekaligus juga dengan apa namanya ada tim terpadu ini antara Tim Teknis dengan dari Komisi II itu Pak pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Lutfi, mungkin,

**F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):**

Jadi itu untuk tidak menerima honorer sudah ada edaran menteri itu. Sudah ada edarannya jadi tidak perlu lagi dicantumkan. Nanti ditindak sama Menteri Men-PAN Pak, tenang saja.

**KETUA RAPAT:**

Baik,  
Bapak-bapak yang saya hormati,

Tentu semangat itu kita bisa pahami bersama, saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa pada hari ini kita fokusnya di anggaran Pak. Jadi kita memang kesimpulannya mungkin lebih mengarah pada bagaimana mekanisme ini bisa kemudian dianggarkan. Mengenai kesepakatan yang di sampaikan oleh Pak Lutfi itu mungkin bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya, untuk menjadi komitmen kita bersama kedepan, karena ini ini kajiannya tentu akan ada tersendiri dari Pak Menteri, dari Kepala BKN dan juga dari rekan-rekan Komisi II ini masih banyak masukan-masukan jadi saya mungkin bisa, apa namanya, menjadikan itu sebagai satu catatan penting pada hari ini tapi pada hari ini kita kaitannya dengan ini. Ada masukan juga dari pimpinan silakan.

TRIA, MBA/F-GERINDRA):

Itu yang point 4 terakhir itu ditambahkan memperjuangkannya itu harus bersama Kermen PAN. Jadi kalau cuma dari Komisi II ya sulit itu. Jadi tambahkan bisa saja di akhir kalimat ditambah saja bersama Kermen PAN Reformasi Birokrasi. Jadi perjuangannya itu harus eksekutif bersama legislatif itu pada prinsipnya setuju Pak Menteri ya?

**KETUA RAPAT:**

Ya oke, ya jadi ada kebersamaan ya kita, Pak Menteri mengajak sama-sama, kita juga begitu dari Komisi II. Oke perbaikannya cukupya? Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sekalian kita setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Alhamdulillah pada ini kita sudah menyepakati satu kesimpulan yang penting dan bersejarah bagi saudara-saudara kita yang berjuang di K2 khususnya, yang hadir sini nanti kita akan buat simulasinya lebih detil untuk menjadi anggaran real ini ya? terima kasih juga kepada BKN dan ORI yang sudah hadir dan rekan-rekan Komisi II yang lainnya. Dan dengan ini kami tutup acara pada hari. Nanti kita akan ada pengumuman sedikit untuk Komisi II tapi agar rapat ini bisa kita selesaikan saya tutup dulu dengan membaca Hamdalah

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)**

Terima kasih Pak Menteri.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Jakarta, 23 Februari 2015  
Ketua Rapat**

ttd

**Rambe Kamarul Zaman  
A-236**